



**PEMERINTAH DAERAH  
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA**

**PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH  
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN  
TERPADU SATU PINTU  
TAHUN 2023**

**Tanjung Pati, September 2023**

## KATA PENGANTAR

Puji Syukur Kehadirat Allah SWT atas terselesaikannya penyusunan Perubahan Rencana Kerja (RENJA) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2023. Perubahan Rencana Kerja (Perubahan RENJA) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2023 adalah merupakan dokumen perencanaan tahun ketiga dari Rencana Strategis (RENSTRA) Tahun 2021 – 2026 yang memuat rencana tujuan dan sasaran periode tersebut yang hendak dicapai.

Program Kegiatan pada Perubahan RENJA 2023 ini mengacu pada Program Kegiatan pada RENSTRA tahun ke-3 dengan tetap mengoptimalkan program dan kegiatan yang telah berjalan pada tahun tahun sebelumnya, disamping itu juga merumuskan program/kegiatan baru untuk menyesuaikan dengan kondisi aktual dan permasalahan yang dihadapi.

Perubahan Rencana Kerja DPMPTSP Tahun 2023 disusun berdasarkan Permendagri Nomor 86 tahun 2017 terdiri dari Pendahuluan, Hasil Evaluasi Rencana Kerja sampai dengan Triwulan II Tahun 2023. Tujuan, Sasaran yang menggambarkan Pencapaian Rencana Strategis, dana Indikatif beserta sumbernya serta prakiraan maju berdasarkan pagu Indikatif, sumber dana yang dibutuhkan untuk melaksanakan program dan kegiatan.

Perubahan Rencana Kerja DPMPTSP tahun 2023 merupakan dokumen Perencanaan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang memuat kebijakan dan program / kegiatan dalam satu tahun dan sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran (RKA) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun Anggaran 2023. Disamping itu juga untuk

mereview hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja sampai Triwulan II Tahun 2023 dan perkiraan capaian tahun berjalan. Melalui Perubahan Rencana Kerja DPMPTSP tahun 2023 ini diharapkan dapat memberikan informasi tentang kejelasan dan manfaat program / kegiatan yang direncanakan bagi pemerintah.

Tanjung Pati, September 2023

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

**ANETA BUDI PUTRA,AP,M.Si**

NIP. 19750515 199501 1 001



## DAFTAR ISI

|                |   |    |
|----------------|---|----|
| <b>BAB I</b>   | <b>PENDAHULUAN1</b>   |    |
| 1.1.           | Latar Belakang -----  | 1  |
| 1.2.           | Landasan Hukum -----  | 4  |
| 1.3.           | Maksud dan tujuan -----   | 7  |
| 1.4.           | Sistematika Penulisan -----   | 8  |
| <b>BAB II</b>  | <b>EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA DPMPTSP TRIWULAN II TAHUN 2023</b>  |    |
| 2.1.           | Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja DPMPTSP Sampai dengan Triwulan II Tahun 2023 -----                           | 11 |
| 2.2.           | Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu -----                         | 36 |
| 2.3.           | Isu – Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu ----- | 42 |
| 2.4.           | Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat -----   | 51 |
| <b>BAB III</b> | <b>RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DPMPTSP</b>  |    |
| 3.1.           | Indikator Kinerja Tahun 2023 -----  | 52 |
| 3.2.           | Rencana Kerja dan Pendanaan Tahun 2023 -----  | 60 |
| <b>BAB IV</b>  | <b>PENUTUP</b> -----  | 71 |

## DAFTAR TABEL

|           |   |    |
|-----------|---|----|
| Tabel 2.1 | Tabel Evaluasi Terhadap Hasil Renja Perangkat Daerah -----                | 20 |
| Tabel 2.2 | Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan -----                        | 37 |
| Tabel 2.3 | Pencapaian Kinerja DPMPTSP Kabupaten Lima Puluh Kota -----                | 39 |
| Tabel 2.4 | Usulan Program dan Kegiatan dari Pemangku Kepentingan Tahun<br>2023 ----- | 51 |
| Tabel 3.1 | Perubahan Program,Kegiatan, dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah ----        | 54 |

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

---

Perubahan Rencana Kerja (RENJA) merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 6 (enam) bulan sebagai dokumen perubahan rencana tahunan, RENJA Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Lima Puluh Kota mempunyai arti strategis dalam penyelenggaraan program pembangunan tahunan Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota mengingat beberapa hal sebagai berikut:

1. Perubahan RENJA merupakan dokumen yang secara substansial penjabaran dari visi, misi dan program Perangkat Daerah seperti yang ditetapkan dalam Rencana Strategis (RENSTRA) dan sesuai arahan operasional dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD);
2. Perubahan RENJA merupakan acuan bagi Perangkat Daerah untuk memasukkan program dan kegiatan ke dalam KUPA-PPAS dan yang akan dilaksanakan dalam Rencana Kerja Anggaran (RKA) pada tahun 2023.
3. Perubahan RENJA merupakan salah satu instrumen evaluasi pelaksanaan program/kegiatan SKPD untuk mengetahui capaian kinerja yang tercantum dalam Rencana Kerja Tahunan (RKT) sebagai wujud dari kinerja Perangkat Daerah.

Dalam rangka mengintegrasikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota, semua Perangkat Daerah di Kabupaten Lima Puluh Kota wajib menyusun dokumen Rencana Kerja (Renja). Renja mempunyai fungsi penting dalam system perencanaan daerah, karena di dalam Renja menterjemahkan perencanaan strategis jangka menengah (RPJMD) dan Resntra Daerah ke dalam rencana program dan penganggaran tahunan. Selain itu Renja perubahan menjembatani sinkronisasi dan harmonisasi Rencana Strategis ke dalam langkah langkah pelaksanaan program tahunan yang lebih konkrit dan terukur. Dengan demikian Renja Perubahan merupakan pedoman penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja

Perubahan (RAPBDP), dimana kebijakan umum APBDP ditetapkan secara bersama sama antara Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dengan Pemerintah.

Mengingat arti strategis Perubahan RENJA Perangkat daerah dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan tahunan pemerintah daerah, maka sejak awal penyusunan hingga penetapan dokumen Perubahan RENJA DPMPTSP Tahun 2023 mengikuti tata cara dan alur penyusunannya sebagaimana tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah antara lain:

1. Disusun berdasarkan evaluasi pelaksanaan RENJA tahun sebelumnya dan mengacu pada RKPD Tahun Tahun berjalan;
2. Program dan Kegiatan dalam RENJA harus sesuai dengan program prioritas sebagaimana tercantum dalam Misi RPJMD Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021-2026;
3. Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan dalam Renja harus selaras dengan program, kegiatan dan Sub Kegiatan yang telah disepakati oleh seluruh pemangku kepentingan dalam Forum Musrenbang Kabupaten Lima Puluh Kota;
4. Program dan Kegiatan dalam Renja dilengkapi dengan indikator hasil (outcome), indikator kinerja keluaran (output) dan dilengkapi dengan pendanaan yang menunjukkan prakiraan maju.

Rencana Kerja Perubahan DPMPTSP Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2023, akan dijadikan sebagai pedoman dan rujukan dalam menyusun program dan kegiatan DPMPTSP Kabupaten Lima Puluh Kota yang telah ditetapkan Prioritas Pembangunan Daerah, yang mengarah pada pencapaian Tujuan dan Sasaran pembangunan yang dalam penyusunannya juga memperhatikan program dan kebijakan dari Pemerintah Daerah dan Pemerintah Pusat yang dilaksanakan di daerah.

Berdasarkan amanat Permendagri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah sesuai dengan Bab II pasal 4 yang berbunyi Pemerintah Daerah wajib menyediakan informasi Pemerintahan Daerah yang terdiri atas Informasi Pembangunan Daerah dan Informasi Keuangan Daerah yang bertujuan untuk menghasilkan layanan informasi Pemerintahan Daerah yang saling terhubung dan



terintegrasi dengan berbasis elektronik dan dapat diakses melalui situs jaringan resmi Kementerian Dalam Negeri.

Secara hirarki penyusunan Rencana Kerja SKPD merupakan produk dasar bagi penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, diserasikan dengan rencana kerja pemerintah dan jadi pedoman dalam penyusunan Rencana Anggaran Belanja Daerah (RAPBD), Renja SKPD mempunyai kedudukan yang strategis, yaitu menjembatani antara perencanaan strategis jangka menengah dengan perencanaan dan penganggaran tahunan.

Penyusunan perubahan Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2023 merupakan kewajiban dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lima Puluh Kota. Hal ini dilakukan untuk dapat menerapkan dan menyelaraskan berbagai aspek kebijakan kepala daerah yang tertuang dalam penjabaran tugas fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lima Puluh Kota sebagaimana diinginkan oleh Kepala Daerah, dalam hal ini Bupati Lima Puluh Kota. Renja DPMPTSP disamping berfungsi sebagai pedoman kerja dan dokumen, juga diharapkan dapat menyatukan visi, misi, persepsi dan strategis seluruh aparat di DPMPTSP Kabupaten Lima Puluh Kota di dalam membina, melayani dan memfasilitasi pembangunan serta pemberdayaan masyarakat yang lebih baik melalui pelayanan publik yang optimal. Selain itu dapat digunakan sebagai bentuk sarana evaluasi kinerja sampai triwulan 2 (dua) tahun 2023 sehingga diharapkan dapat menjadi tolok ukur untuk bisa memacu kinerja pada tahun yang akan datang, terutama peningkatan kualitas sumber daya manusia pada DPMPTSP Kabupaten Lima Puluh Kota.

Untuk itu menyusun Rencana Kerja Perubahan DPMPTSP Tahun 2023 dengan memperhatikan amanat Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 pasal 3 yang berbunyi Perencanaan pembangunan Daerah bertujuan untuk mewujudkan pembangunan Daerah dalam rangkapeningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing Daerah.

Untuk mendukung pelaksanaan program dan kegiatannya dapat mempedomani Peraturan Menteri Dalam Negeri( Permendagri ) nomor 90 tahun 2019 dan Pemutakhiran Program dan Kegiatan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5589 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

Rencana Kerja OPD mempunyai kedudukan yang strategis yaitu menjembatani antara perencanaan pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dengan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD), sebagai implementasi pelaksanaan strategis jangka menengah (RPJMD) daerah dan Renstra OPD yang menjadi satu kesatuan untuk mendukung pencapaian Visi dan Misi Daerah. Renja OPD disusun oleh masing-masing Organisasi Perangkat Daerah secara terpadu, partisipatif dan demokratis. Rencana Kerja OPD digunakan sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Perangkat Daerah untuk penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten dan sebagai dasar pengusulan program/kegiatan yang akan dibiayai APBD Propinsi dan APBN.

## **1.2 Landasan Hukum**

---

Adapun yang menjadi landasan hukum dalam penyusunan Perubahan RENJA DPMPTSP Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

Landasan hukum penyusunan Perubahan Renja DPM-PTSP Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2023 adalah:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286).
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400).

3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400).
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421).
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438).
6. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724).
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor. 125, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437).
8. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 Tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom.
9. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2001 Tentang Pelaporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4124;
11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2004 Tentang Rencana Kerja Kementerian dan Lembaga;
12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6215);

13. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2005 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional;
14. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 97 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 20 tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PPTSP) di Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 100 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi dan Kabupaten/ Kota;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta tata cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan rencana Kerja Perangkat Daerah;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1956);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 10 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2011 Nomor 10);

22. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2011 Nomor);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 15 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
24. Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 56 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan, Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu;
25. Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 85 Tahun 2018 Tentang Standar Operasional Prosedur Perizinan Terpadu pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lima Puluh Kota;
26. Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 45 Tahun 2019 Tentang Pelimpahan Wewenang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Dari Bupati Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lima Puluh Kota ;

### **1.3 Maksud dan Tujuan**

---

#### **1.3.1 Maksud**

Maksud penyusunan perubahan RKPD Kabupaten Lima Puluh Kota tahun 2023 ini adalah untuk menyediakan dokumen perubahan rencana kerja tahun 2023 yang berfungsi sebagai acuan dan arahan pelaksanaan kegiatan yang akan dilaksanakan dalam RKA Perubahan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, yang sinergis dan partisipatif serta sekaligus sebagai alat untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan Program dan kegiatan di perangkat daerah Tahun 2023.

Penyusunan Perubahan RENJA DPMPTSP Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2023 dimaksudkan sebagai panduan dalam melakukan evaluasi pelaksanaan program/kegiatan semester satu Tahun 2023 dan perencanaan program/kegiatan yang akan dilaksanakan dalam Rencana Kerja Anggaran Perubahan (RKA) DPMPTSP Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2023.

### **1.3.2 Tujuan**

Tujuan dari penyusunan perubahan RKP Kabupaten Lima Puluh Kota tahun 2023 antara lain:

1. Sebagai landasan penyusunan perubahan KUA dan perubahan PPAS Tahun 2023 dalam rangka penyusunan perubahan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2023;
2. Sebagai pedoman penyempurnaan rancangan perubahan RenjaPD Tahun 2023;
3. Sebagai bahan evaluasi rancangan perubahan Peraturan Daerah tentang APBD;
4. Untuk memastikan bahwa perubahan APBD telah disusun berlandaskan perubahan RKP;
5. Sebagai bahan dasar dalam pengendalian dan evaluasi dokumen perencanaan tahunan daerah.

## **1.4 Sistematika Penulisan**

---

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah dan Permendagri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah maka sistematika Penyusunan Renja Perubahan DPMPTSP Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2023 meliputi:

**BAB I PENDAHULUAN**, berisi tentang: 1.1 Latar Belakang, 1.2 Landasan Hukum, 1.3 Maksud dan Tujuan 1.4 Sistematika Penulisan.

**BAB II HASIL EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2023** berisi tentang: 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Triwulan II Tahun 2023, 2.2 Analisis Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, 2.3 Isu-Isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi, 2.4 Penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat

**BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH,** berisi tentang : 3.1 Indikator Kinerja Tahun 2023, 3.2 Rencana Kerja dan Pendanaan

**BAB IV PENUTUP**

# **BAB II**

## **EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SAMPAI TRIWULAN II TAHUN 2023**

Berdasarkan Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Nasional, Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia. Sedangkan tahapan perencanaan pembangunan tersebut meliputi :

- 1) Penyusunan perencanaan,
- 2) Penetapan rencana,
- 3) Pengendalian pelaksanaan rencana,
- 4) Evaluasi pelaksanaan rencana.

Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana dilakukan oleh masing - masing pimpinan Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah. Tindak lanjut dari Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 dimaksud, terhadap pengendalian dan evaluasi diatur lebih lanjut oleh Peraturan Menteri Dalam Negeri yaitu Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Tata cara pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, berdasarkan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 bertujuan untuk mewujudkan:

1. Konsistensi antara kebijakan dengan pelaksanaan dan hasil rencana pembangunan Daerah.
2. Konsistensi antara RPJPD dengan RPJPN dan RTRW Nasional.
3. Konsistensi antara RPJMD dengan RPJPD dan RTRW Daerah.
4. Konsistensi antara RKPD dengan RPJMD.
5. Kesesuaian antara capaian pembangunan Daerah dengan indikator kinerja yang telah ditetapkan



## 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Tahun 2023 sampai Triwulan II DMPTSP

---

RPJMD Kabupaten Lima Puluh Kota tahun 2021-2026 dijabarkan kedalam RKPD tahunan. Visi dari pembangunan daerah untuk tahun 2021-2026 adalah **“Mewujudkan Lima Puluh Kota yang Madani, Beradat dan Berbudaya dalam Kerangka Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah”** Upaya untuk mewujudkan visi tersebut diatas , melalui 5 Misi Pembangunan Daerah sebagai berikut:

1. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang berbudaya dan berdaya saing berlandaskan keimanan;
2. Mendorong pertumbuhan dan perkembangan Ekonomi Lintas Sektoral yang memiliki keunggulan ditingkat lokal dan regional;
3. Mendorong potensi nagari sebagai pembangunan daerah;
4. Meningkatkan kualitas pelayanan publik melalui reformasi birokrasi seutuhnya
5. Meningkatkan pembangunan infrastruktur secara terpadu yang mendorong pertumbuhan ekonomi dan kualitas kehidupan masyarakat yang lebih baik

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2023 ditetapkan dengan Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 17 Tahun 2023 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2023.

Pelaksanaan program dan kegiatan yang ditampung dalam ABPD tahun 2023 dapat melihat seberapa jauh tingkat capaian yang dapat dicapai oleh perangkat daerah. Melihat kondisi yang berkembang dan kondisi yang terjadi pada tahun 2023 berhubung dengan kondisi keuangan daerah perlu adanya Perubahan RKPD Tahun 2023.

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lima Puluh Kota melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal dengan 6 (enam) Program, 12 (dua belas ) kegiatan dan 29 (dua puluh sembilan) sub kegiatan dengan realisasi sampai Triwulan II sebagai berikut :

## **A. Urusan Pemerintah Bidang Penanaman Modal :**

### **1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**

#### **1.1 Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**

**Sub Kegiatan terdiri dari :**

- 1) Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah**, alokasi dana Rp. 2.686.000 Realisasi keuangan Rp. 2.628.000 (97,84 %) dan Realisasi fisik 97,84 % , keluaran dari sub kegiatan ini adalah Terealisasinya Dokumen Renstra dan Renja DPMPTSP Capaian Kinerja berupa Tersedianya Dokumen Renstra dan Renja DPMPTSP
- 2) Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD**, alokasi dana Rp. 0 Realisasi keuangan Rp. 0 (0 %) dan Realisasi fisik 0 % , keluaran dari subkegiatan ini adalah Terealisasinya Dokumen RKA SKPD Capaian Kinerja berupa Tersedianya Dokumen RKA SKPD
- 3) Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD**, alokasi dana Rp. 0 Realisasi keuangan Rp. 0 (0 %) dan Realisasi fisik 0 % , keluaran dari subkegiatan ini adalah Tersedianya Dokumen Perubahan RKA SKPD Capaian Kinerja berupa Tersedi Dokumen Perubahan RKA SKPD
- 4) Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD**, alokasi dana Rp. 0 Realisasi keuangan Rp. 0 (0 %) dan Realisasi fisik (0 %), keluaran dari sub kegiatan ini adalah Terealisasinya Dokumen Penyusunan DPA-SKPD Capaian Kinerja berupa Tersedianya Dokumen Penyusunan DPA-SKPD
- 5) Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD**, alokasi dana Rp. 0 Realisasi keuangan Rp. 0 (0%) dan Realisasi fisik 0 % , keluaran dari subkegiatan ini adalah Terealisasinya Dokumen Penyusunan Perubahan DPA-SKPD Capaian Kinerja berupa Tersedianya Dokumen Penyusunan Perubahan DPA-SKPD
- 6) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD**, alokasi dana Rp. 5.000.000 Realisasi keuangan Rp. 3.204.000 (64,08 %) dan Realisasi fisik 64,08 % , keluaran dari subkegiatan ini adalah Tersusunnya Laporan Realisasi Kinerja DPMPTSP Capaian Kinerja berupa Tersusunnya Laporan Realisasi Kinerja DPMPTSP
- 7) Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**, alokasi dana Rp. 0 Realisasi keuangan Rp. 0 (0 %) dan Realisasi fisik 0 % , keluaran dari subkegiatan ini adalah Terealisasinya Dokumen SAKIP Monitoring dan Evaluasi Kegiatan OPD Capaian Kinerja berupa Tersedianya Dokumen SAKIP Monitoring dan Evaluasi Kegiatan OPD

## 1.2. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Sub Kegiatan terdiri dari :

- 1) **Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN**, alokasi dana Rp. 2.584.980.382 Realisasi keuangan Rp.1.310.403.924 (50,69%) dan Realisasi fisik 50,69 %, keluaran dari subkegiatan ini adalah Terealisasinya pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN dengan Capaian Kinerja berupa tertibnya administrasi keuangan kantor
- 2) **Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD**, alokasi dana Rp. 5.000.000 Realisasi keuangan Rp.4.997.000 (99,94 %) dan Realisasi fisik 99,94 %, keluaran dari subkegiatan ini Terealisasinya Laporan Keuangan Akhir Tahun DPMPTSP dengan Capaian Kinerja berupa tertibnya laporan keuangan akhir tahun DPMPTSP yang akuntabel
- 3) **Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan /Semesteran SKPD**, alokasi dana Rp. 2.656.000 Realisasi keuangan Rp.0 (0%) dan Realisasi fisik 0 %, keluaran dari subkegiatan ini Terealisasinya Laporan Keuangan Semesteran Teralisasinya Laporan Keuangan Bulanan dengan Capaian Kinerja berupa tertibnya laporan keuangan Bulanan / Triwulanan /Semesteran DPMPTSP yang akuntabel
- 4) **Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran**, alokasi dana Rp. 0 Realisasi keuangan Rp.0 (0%) dan Realisasi fisik 0 %, keluaran dari subkegiatan ini Terealisasinya Dokumen Pelaporan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran dengan Capaian Kinerja berupa Terealisasinya Dokumen Pelaporan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran DPMPTSP yang akuntabel.

## 1.3. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

Sub Kegiatan terdiri dari :

- 1) **Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan**, alokasi dana Rp. 0 ,- Realisasi keuangan Rp.0 (0%) dan Realisasi fisik 0%, subkegiatan ini adalah kegiatan yang termasuk dalam refocussing anggaran.

## 1.4. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah

Sub Kegiatan terdiri dari :

- 1) **Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor**, alokasi dana Rp.1.001.000, keuangan Rp.874.000,- (87,31%) dan Realisasi fisik 87,31 % keluaran dari subkegiatan ini adalah Terpenuhinya Penyediaan Listrik dan Penerangan Perkantoran dengan Capaian Kinerja berupa berfungsinya alat-alat listrik dan penerangan kantor.
- 2) **Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor**, alokasi dana Rp. 22.000.000,- Realisasi keuangan Rp. 12.365.600,- (56,21%) dan Realisasi fisik 56,21%, keluaran dari subkegiatan ini adalah Terpenuhinya Peralatan dan Pelengkapan Kantor yang siap digunakan dengan Capaian Kinerja berupa Tersedianya Peralatan dan Pelengkapan Kantor yang siap.
- 3) **Penyediaan Peralatan RumahTangga**, alokasi dana Rp. 0,- Realisasi keuangan Rp. 0,- (0%) dan Realisasi fisik 0%, subkegiatan ini adalah kegiatan yang termasuk dalam refocussing anggaran.
- 4) **Penyediaan Bahan Logistik Kantor**, alokasi dana Rp. 2.990.800,- Realisasi keuangan Rp. 1.647.950,- (55,10%) dan Realisasi fisik 55,10 %, keluaran dari subkegiatan ini adalah Terwujudnya Kebersihan bangunan Kantor dengan Capaian Kinerja berupa Terwujudnya Kebersihan bangunan Kantor
- 5) **Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan** alokasi dana Rp. 18.138.700,- Realisasi keuangan Rp. 8.285.800,- (45,68 %) dan Realisasi fisik 45,68%, keluaran dari subkegiatan ini adalah Lancarnya Proses Pembiayaan Barang Cetak dan Penggandaan dengan Capaian Kinerja berupa Tersedianya Cetak dan Penggandaan DPMPTSP
- 6) **Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan**, alokasi dana Rp. 4.000.000,- Realisasi keuangan Rp. 4.000.000,- (100%) dan Realisasi fisik 100 %, subkegiatan ini adalah kegiatan yang termasuk dalam refocussing anggaran.
- 7) **Fasilitasi Kunjungan Tamu** alokasi dana Rp. 5.600.000,- Realisasi keuangan Rp. 3.729.000,- (66,59 %) dan Realisasi fisik 66,59 %, keluaran dari subkegiatan ini adalah Terlaksananya Pelayanan Tamu Kantor dengan Capaian Kinerja berupa Terlaksananya Rapat-rapat dan terlayannya tamu.
- 8) **Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD** alokasi dana Rp. 161.582.750,- Realisasi keuangan Rp. 72.296.615,- (44,74%) dan Realisasi fisik 64,95 % , keluaran dari

subkegiatan ini adalah Terlaksananya Pekerjaan yang Berkaitan dengan Instansi Baik di Dalam maupun di Luar dengan Capaian Kinerja berupa Tersedianya Dana untuk Koordinasi dan Konsultasi SKPD.

#### **1.5. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**

**Sub Kegiatan terdiri dari :**

- 1) Pengadaan kendaraan dinas operasional atau lapangan** alokasi dana Rp. 0,- Realisasi keuangan Rp. 0 (0%) dan Realisasi fisik 0% sub kegiatan adalah termasuk dalam refocussing sub kegiatan dan alokasi anggaran
- 2) Pengadaan Mebel** alokasi dana Rp. 0,- Realisasi keuangan Rp. 0 (0%) dan Realisasi fisik 0% sub kegiatan ini adalah termasuk dalam refocussing sub kegiatan dan alokasi anggaran
- 3) Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya** alokasi dana Rp. 0,- Realisasi keuangan Rp. 0 (0%) dan Realisasi fisik 0% sub kegiatan ini adalah termasuk dalam refocussing sub kegiatan dan alokasi anggaran

#### **1.6. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**

**Sub Kegiatan terdiri dari :**

- 1) Penyediaan Jasa Surat Menyurat** alokasi dana Rp. 280.000,- Realisasi keuangan Rp. 0 (0%) dan Realisasi fisik 0% , keluaran kegiatan ini adalah Terdistribusinya Surat Keluar dan Tercukupinya Benda Pos dengan Capaian Kinerja berupa adalah lancarnya administrasi perkantoran
- 2) Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik** alokasi dana Rp. 58.800.000,- realisasi keuangan Rp. 17.826.656,- (30,32,%) dan Realisasi fisik 30.32 %, keluaran dari kegiatan ini adalah Lancarnya Penyediaan Telepon,Internet,Air dan Listrik dengan Capaian Kinerja berupa ancarnya Penyediaan Telepon,Internet,Air dan Listrik
- 3) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor** alokasi dana Rp. 143.634.000 realisasi keuangan Rp 88.285.338,- (61,47%) dan Realisasi fisik 61,47%, keluaran dari kegiatan ini adalah Terwujudnya Jasa Pelayanan ADM Perkantoran yang Efektif dan Efisien dengan

Capaian Kinerja berupa bertambahnya motivasi dan semangat untuk bekerja, lancarnya Proses pengadaan alat tulis kantor, dan terciptanya suasana kantor yang bersih.

### **1.7. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**

**Sub Kegiatan terdiri dari :**

- 1) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan**, alokasi dana Rp.116.456.000,- Realisasi keuangan Rp. 58.027.750 (49,83 %) dan Realisasi fisik 49,83 % , keluaran dari kegiatan ini adalah Terawatnya dan Terpeliharanya serta terlaksananya Pembayaran Pajak Kendaraan Dinas dengan Capaian Kinerja berupa tersedianya pembayaran surat surat kendaraan dinas dan terpeliharanya peralatan gedung kantor.
- 2) Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya** alokasi dana Rp.2.070.000,- Realisasi keuangan Rp. 730.000 (35,27 %) dan Realisasi fisik 35,27 % , keluaran dari kegiatan ini adalah Terpelihara dan Terawatnya Peralatan Mesin Kantor dengan Capaian Kinerja berupa Terpelihara dan Terawatnya Peralatan Mesin Kantor
- 3) Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bahan Bangunan Lainnya** alokasi dana Rp. 200.000.000,- Realisasi keuangan Rp. 0 (0%) dan Realisasi fisik 0% keluaran dari kegiatan ini adalah Terpelihara dan Terawatnya Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bahan Bangunan Lainnya dengan Capaian Kinerja berupa Terpelihara dan Terawatnya Gedung Kantor dan Bahan Bangunan Lainnya.

### **2.1 PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL**

#### **2.2 Kegiatan Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal Yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabuapten / Kota**

**Sub Kegiatan terdiri dari :**

- 1) Penetapan Kebijakan Daerah mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal** alokasi dana Rp. 0,- Realisasi keuangan Rp. 0 (0%) dan Realisasi fisik 0% sub kegiatan ini adalah termasuk dalam refocussing sub kegiatan dan alokasi anggaran.
- 2) Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal** alokasi dana Rp. 11.777.550,- Realisasi keuangan Rp. 7.756.250 (65,86%) dan Realisasi fisik 65,86% sub kegiatan ini adalah termasuk dalam refocussing sub kegiatan dan alokasi anggaran.

## **2.3 Kegiatan Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota**

**Sub Kegiatan terdiri dari :**

- 1) Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota** alokasi dana Rp. 0,- Realisasi keuangan Rp. 0 (0%) dan Realisasi fisik 0% sub kegiatan ini adalah termasuk dalam refocussing sub kegiatan dan alokasi anggaran.

### **3. Program Promosi Penanaman Modal**

#### **3.1 Kegiatan Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota**

**Sub Kegiatan terdiri dari :**

- 1) Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal** alokasi dana Rp. 0,- Realisasi keuangan Rp. 0 (0%) dan Realisasi fisik 0% sub kegiatan ini adalah termasuk dalam refocussing sub kegiatan dan alokasi anggaran.

- 2) Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota** alokasi dana Rp. 0,- Realisasi keuangan Rp. 0 (0%) dan Realisasi fisik 0% sub kegiatan ini adalah termasuk dalam refocussing sub kegiatan dan alokasi anggaran.

### **4. Program Pelayanan Penanaman Modal**

#### **4.1 Kegiatan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota**

**Sub Kegiatan terdiri dari :**

- 1) Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik,** alokasi dana Rp. 0,- Realisasi keuangan Rp. 0 (0%) dan Realisasi fisik 0% sub kegiatan ini adalah termasuk dalam refocussing sub kegiatan dan alokasi anggaran.

- 2) Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal,** alokasi dana Rp. 0,- Realisasi keuangan Rp. 0 (0%) dan Realisasi fisik 0% sub kegiatan ini adalah termasuk dalam refocussing sub kegiatan dan alokasi anggaran.

- 3) Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan** alokasi dana Rp. 0,- Realisasi keuangan Rp. 0 (0%) dan Realisasi fisik 0% sub kegiatan ini adalah termasuk dalam refocussing sub kegiatan dan alokasi anggaran.

- 4) Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan pemberian Fasilitas/Insentif Daerah,** alokasi dana Rp. 0,- Realisasi keuangan Rp. 0 (0%) dan Realisasi fisik 0% sub kegiatan ini adalah termasuk dalam refocussing sub kegiatan dan alokasi anggaran

## **5. Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal**

### **5.1 Kegiatan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota**

**Sub Kegiatan terdiri dari :**

- 1) Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal,** alokasi dana Rp. 0,- Realisasi keuangan Rp. 0 (0%) dan Realisasi fisik 0% sub kegiatan ini adalah termasuk dalam refocussing sub kegiatan dan alokasi anggaran.
  
- 2) Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal,** alokasi dana Rp.330.100.00,- Realisasi keuangan Rp. 163.430.900 (49,51%) dan Realisasi fisik 49,51 % keluaran dari kegiatan ini Laporan hasil pembinaan dalam memfasilitasi penyelesaian permasalahan penanaman modal dengan Capaian Kinerja berupa adanya Laporan hasil pembinaan dalam memfasilitasi penyelesaian permasalahan penanaman modal
  
- 3) Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal,** alokasi dana Rp.170.700.000,- Realisasi keuangan Rp.900.000 (0,53%) dan Realisasi fisik 0,53 % keluaran dari kegiatan ini Kesesuaian pelaksanaan kegiatan Penanaman Modal dengan dokumen Perizinan yang dimiliki oleh pelaku usahadengan Capaian Kinerja berupa jumlah pengawasan investor pelaksanaan penanaman modal (50 perusahaan).

## **6. Program Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal**

### **6.1 Kegiatan Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**

**Sub Kegiatan terdiri dari :**



- 1) Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik, alokasi dana Rp. 5.000.000,- Realisasi keuangan Rp. 0 (0%) dan Realisasi fisik 0% sub kegiatan ini adalah Tersedianya Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang diolah Dikaji dan Dimanfaatkan.

Formulir E.81

Evaluasi Hasil Terhadap Renja Perangkat Daerah  
 Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Lima Puluh Kota  
 Periode Pelaksanaan: 2023

| No | Sasaran                  | Program/<br>Kegiatan                | Indikator<br>Kinerja<br>Program<br>( <i>outcome</i> )/<br>Kegiatan<br>( <i>output</i> ) | Target<br>Renstra<br>Perangkat<br>Daerah<br>pada Tahun<br>2026 (Akhir<br>Periode<br>Renstra<br>Perangkat<br>Daerah) |    | Realisasi<br>Capaian<br>Kinerja<br>Renstra<br>Perangkat<br>Daerah<br>sampai<br>dengan<br>Renja<br>Perangkat<br>Daerah<br>Tahun Lalu<br>(2022) |    | Target<br>Kinerja<br>dan<br>Anggaran<br>Renja<br>Perangkat<br>Daerah<br>Tahun<br>berjalan<br>yang<br>dievaluasi<br>(2023) |    | Realisasi Kinerja Pada Triwulan |    |     |    | Realisasi<br>Capaian<br>Kinerja dan<br>Anggaran<br>Renja<br>Perangkat<br>Daerah yang<br>dievaluasi |    | Realisasi<br>Kinerja dan<br>Anggaran<br>Renstra<br>Perangkat<br>Daerah s/d<br>tahun 2022<br>(Akhir<br>Tahun<br>Pelaksanaan<br>Renja<br>Perangkat<br>Daerah<br>Tahun<br>2026) |    | Tingkat<br>Capaian<br>Kinerja<br>Dan<br>Realisasi<br>Anggaran<br>Renstra<br>Perangkat<br>Daerah<br>s/d<br>tahun<br>2022<br>(%) |    | Unit<br>Perangkat<br>Daerah<br>Penerimaan<br>Jawab |    |  |
|----|--------------------------|-------------------------------------|---|---|----|---|----|---|----|---------------------------------|----|-----|----|--|----|--|----|--|----|--|----|--|
|    |                          |                                     |   |   |    |   |    |   |    | I                               | II | III | IV |  |    |  |    |  |    |  |    |  |
| 1  | 2                        | 3                                   | 4   | 5   |    | 6   |    | 7   |    | 8                               |    | 9   |    | 10   | 11 | 12   |    | 13 = 6+12  |    | 14 = 13 / 5 x 100 %                                | 15 |  |
|    |                          |                                     |   | K   | Rp | K   | Rp | K   | Rp | K                               | Rp |     |    |  |    | K  | Rp | K  | Rp | K  | Rp |  |
|    | Meningkatnya Akuntabilit | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN |   |   |    |   |    |   |    |                                 |    |     |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |

|   |   |  |   |           |                |           |               |           |               |           |             |           |             |  |  |  |           |               |           |               |      |           |           |
|---|---|--|---|-----------|----------------|-----------|---------------|-----------|---------------|-----------|-------------|-----------|-------------|--|--|--|-----------|---------------|-----------|---------------|------|-----------|-----------|
|   | tas Kinerja dan Keuangan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu | AN TERPADU SATU  |   |           |                |           |               |           |               |           |             |           |             |  |  |  |           |               |           |               |      |           |           |
|   |   | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL                       |   |           | 41,043,357,354 |           | 4,082,899,653 |           | 3,586,959,432 |           | 602,738,439 |           | 791,797,254 |  |  |  |           | 1,394,535,693 |           | 5,477,435,346 |      | 0.133     |           |
| I | Modul dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu  | Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kab / Kota            | Persentase Pelaksanaan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah         |           | 36,776,942,474 |           | 3,700,717,153 |           | 3,069,381,882 |           | 602,738,439 |           | 692,147,254 |  |  |  |           | 1,294,885,693 |           | 4,995,602,846 |      | 0.136     |           |
| 1 |   | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Pesentas e Sinergitas Perencanaan dan Evaluasi Pembanguann Daerah |           | 652,800,000    |           | 35,062,800    |           | 7,686,000     |           | 5,040,000   |           | 792,000     |  |  |  |           | 5,832,000     |           | 40,894,800    | 7.33 | 0.47      |           |
|   |   | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                  | Terealisasi nya Dokumen Renstra dan Renja DPMPTSP                 | 2 Dokumen | 185,000,000    | 2 Dokumen | 9,274,400     | 2 Dokumen | 2,686,000     | 1 Dokumen | 1,836,000   | 1 Dokumen | 792,000     |  |  |  | 1 Dokumen | 2,628,000     | 3 Dokumen | 11,902,400    | 1.50 | 0.06      | DPM PTS P |
|   |   | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD                       | Terealisasi nya Dokumen RKA SKPD                                  | 1 Dokumen | 49,100,000     | 1 Dokumen | 2,680,000     | -         | -             | -         | -           | -         | -           |  |  |  | -         | 1 Dokumen     | 2,680,000 | 1.00          | 0.05 | DPM PTS P |           |
|   |   | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen                                | Terealisasi nya Dokumen   | 1 Dok     | 47,100         | 1 Dok     | 4,952,        | -         | -             | -         | -           | -         | -           |  |  |  | -         | 1 Dok         | 4,952,    | 1.            | 0.   | DPM PTS   |           |

|   |  |   |  |           |                       |           |                      |           |                      |           |                    |   |   |   |           |                    |           |                      |                      |             |             |           |
|---|--|---|--|-----------|-----------------------|-----------|----------------------|-----------|----------------------|-----------|--------------------|---|---|---|-----------|--------------------|-----------|----------------------|----------------------|-------------|-------------|-----------|
|   |  | n Dokumen Perubahan RKA-SKPD  | Perubahan RKA SKPD   | ume n     | ,000                  | ume n     | 000                  |           |                      |           |                    |   |   |   |           |                    |           | um en                | 000                  | 0           | 1           | P         |
|   |  | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD  | Terealisasi Dokumen Penyusunan DPA-SKPD                        | 1 Dokumen | 51,600,000            | 1 Dokumen | 4,727,800            | -         | -                    | -         | -                  | - | - | - | -         | -                  | -         | 1 Dokumen            | 4727800              | 1.000       | 0.09        | DPM PTS P |
|   |  | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD  | Terealisasi Dokumen Penyusunan Perubahan DPA-SKPD              | 1 Dokumen | 59,000,000            | 1 Dokumen | 246,300              | -         | -                    | -         | -                  | - | - | - | -         | -                  | -         | 1 Dokumen            | 246,300              | 1.000       | 0.00        | DPM PTS P |
|   |  | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Tersusunnya Laporan Realisasi Kinerja DPMPTSP                  | 5 Dokumen | 76,300,000            | 5 Dokumen | 4,773,900            | 5 Dokumen | 5,000,000            | 1 Dokumen | 3,204,000          | - | - | - | 1 Dokumen | 3,204,000          | 5 Dokumen | 7,977,900            | 0.83                 | 0.10        | DPM PTS P   |           |
|   |  | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah   | Terealisasi Dokumen SAKIP Monitoring dan Evaluasi Kegiatan OPD | 6 Dokumen | 184,700,000           | 6 Dokumen | 8,408,400            | -         | -                    | -         | -                  | - | - | - | -         | -                  | 6 Dokumen | 8,408,400            | 1.000                | 0.05        | DPM PTS P   |           |
| 2 |  | <b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>   | <b>Persentase Tersedianya Administrasi Keuangan Daerah</b>     |           | <b>26,549,591,474</b> |           | <b>2,919,753,087</b> |           | <b>2,575,136,382</b> |           | <b>430,839,829</b> |   |   |   |           | <b>616,125,383</b> |           | <b>1,046,965,212</b> | <b>3,966,718,299</b> | <b>4.25</b> | <b>0.41</b> |           |

|   |  |   |  |            |                |                    |               |            |               |           |             |         |             |  |  |  |           |               |            |               |      |      |           |
|---|--|---|--|------------|----------------|--------------------|---------------|------------|---------------|-----------|-------------|---------|-------------|--|--|--|-----------|---------------|------------|---------------|------|------|-----------|
|   |  | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN   | Terealisasi pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN                                | 12 bulan   | 26,406,891,474 | 12 bulan           | 2,910,900,787 | 12 bulan   | 2,567,480,382 | 3 bulan   | 425,842,829 | 3 bulan | 616,125,383 |  |  |  | 3 bulan   | 1,041,968,212 | 15 bulan   | 3,952,868,999 | 0.25 | 0.15 | DPM PTS P |
|   |  | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD                       | Terealisasi Laporan Keuangan Akhir Tahun DPMPTSP                             | 1 laporan  | 61,200,000     | 1 Laporan          | 4,444,400     | 1 laporan  | 5,000,000     | 1 laporan | 4,997,000   | -       | -           |  |  |  | 1 laporan | 4,997,000     | 2 laporan  | 9,441,400     | 2.00 | 0.15 | DPM PTS P |
|   |  | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD | Terealisasi Laporan Keuangan Semesteran Terealisasi Laporan Keuangan Bulanan | 2/12 bulan | 41,700,000     | 2 bulan / 12 bulan | 2,510,200     | 2/12 bulan | 2,656,000     | -         | -           | -       | -           |  |  |  | -         | -             | 2/12 bulan | 2,510,200     | 1.00 | 0.06 | DPM PTS P |
|   |  | Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran                    | Terealisasi Dokumen Pelaporan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran          | 1 laporan  | 39,800,000     | 1 Laporan          | 1,897,700     | -          | -             | -         | -           | -       | -           |  |  |  | -         | -             | 1 laporan  | 1,897,700     | 1.00 | 0.05 | DPM PTS P |
| 3 |  | <b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>                                  | <b>Terpenuhnya sarana penunjang administrasi kepegawaian dinas</b>           |            | 264,000,000    |                    | -             |            | -             |           | -           |         | -           |  |  |  |           | -             |            | -             |      | -    |           |

|   |  |  |   |          |                      |          |                    |        |                    |         |                   |         |                   |   |   |   |         |                    |          |                    |            |             |
|---|--|--|---|----------|----------------------|----------|--------------------|--------|--------------------|---------|-------------------|---------|-------------------|---|---|---|---------|--------------------|----------|--------------------|------------|-------------|
|   |  | Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan       | Tersedianya Bimtek Implementasi Peraturan Perundang-undangan      | 35 orang | 264,000,000          | -        | -                  | -      | -                  | -       | -                 | -       | -                 | - | - | - | -       | -                  | -        | -                  | DPM PTS P  |             |
| 4 |  | <b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>                        | <b>Persentase Tersedianya Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>  |          | <b>2,014,000,000</b> |          | <b>303,431,442</b> |        | <b>165,319,500</b> |         | <b>69,464,489</b> |         | <b>31,064,476</b> |   |   |   |         | <b>100,528,965</b> |          | <b>403,960,407</b> | <b>7.5</b> | <b>1.13</b> |
|   |  | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Terpenuhinya Penyediaan Listrik dan Penerangan Perkantoran        | 12 bln   | 55,000,000           | 12 Bulan | 3,060,000          | 12 bln | 1,001,000          | 3 bulan | 874,000           | 3 bulan | -                 |   |   |   | 3 bulan | 874,000            | 15 bulan | 3,934,000          | 1.25       | 0.07        |
|   |  | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                     | Terpenuhinya Peralatan dan Pelengkapan Kantor yang siap digunakan | 12 bln   | 164,000,000          | 12 Bulan | 33,329,000         | 12 bln | 22,000,000         | 3 bulan | 8,967,200         | 3 bulan | 3,118,400         |   |   |   | 3 bulan | 12,085,600         | 15 bulan | 45,414,600         | 1.25       | 0.28        |
|   |  | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga                                | Tersedianya Keperluan Peralatan Rumah Tangga yang memadai         | 12 bln   | 71,000,000           | -        | -                  | -      | -                  | -       | -                 | -       | -                 |   |   |   | -       | -                  | -        | -                  | -          | DPM PTS P   |
|   |  | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                 | Terwujudnya Kebersihan bangunan Kantor                            | 12 bln   | 45,000,000           | 12 bulan | 6,007,900          | 12 bln | 2,990,800          | 3 bulan | 1,497,950         | 3 bulan | -                 |   |   |   | 3 bulan | 1,497,950          | 15 bulan | 7,505,850          | 1.25       | 0.17        |

|   |  |   |  |        |                      |          |             |        |             |         |            |         |            |  |  |  |         |            |          |             |      |      |           |
|---|--|---|--|--------|----------------------|----------|-------------|--------|-------------|---------|------------|---------|------------|--|--|--|---------|------------|----------|-------------|------|------|-----------|
|   |  | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                                 | Terwujudnya ADM Perkantoran yang Baik  | 12 bln | 202,400,000          | 12 Bulan | 20,978,800  | 12 bln | 18,138,700  | 3 bulan | 5,069,800  | 3 bulan | 1,716,000  |  |  |  | 3 bulan | 6,785,800  | 15 bulan | 27,764,600  | 1.25 | 0.14 | DPM PTS P |
|   |  | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan                | Peningkatan Wawasan dan Informasi Sumber Daya Aparatur                               | 12 bln | 23,600,000           | -        | -           | 12 bln | 4,000,000   | -       | -          | -       | 4,000,000  |  |  |  | -       | 4,000,000  | -        | 4,000,000   |      | 0.17 | DPM PTS P |
|   |  | Fasilitasi Kunjungan Tamu   | Terlaksananya Pelayanan Tamu Kantor  | 12 bln | 123,000,000          | 12 Bulan | 6,600,000   | 12 bln | 5,600,000   | 3 bulan | 2,989,000  | -       | -          |  |  |  | 3 bulan | 2,989,000  | 15 bulan | 9,589,000   | 1.25 | 0.08 | DPM PTS P |
|   |  | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                    | Terlaksananya Pekerjaan yang Berkaitan dengan Instansi Baik di Dalam Maupun di Luar  | 12 bln | 1,330,000,000        | 12 Bulan | 233,455,742 | 12 bln | 111,589,000 | 3 bulan | 50,066,539 | 3 bulan | 22,230,076 |  |  |  | 3 bulan | 72,296,615 | 15 bulan | 305,752,357 | 1.25 | 0.23 | DPM PTS P |
| 5 |  | <b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b> | <b>Persentase Tersedianya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b> |        | <b>2,893,951,000</b> |          | <b>0</b>    |        | <b>0</b>    |         | <b>0</b>   |         | <b>0</b>   |  |  |  |         | <b>0</b>   |          | <b>0</b>    |      | -    |           |
|   |  | Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional/                                  | Tersedianya Kendaraan Dinas  | 3 unit | 2,314,975,000        |          | -           |        | -           |         | -          | -       | -          |  |  |  |         | -          |          |             |      |      | DPM PTS P |

|   |  |   |  |          |                      |          |                    |          |                    |         |                   |         |                   |  |  |         |                   |          |                    |             |              |           |
|---|--|---|--|----------|----------------------|----------|--------------------|----------|--------------------|---------|-------------------|---------|-------------------|--|--|---------|-------------------|----------|--------------------|-------------|--------------|-----------|
|   |  | Lapangan  | Operasional atau Lapangan  |          |                      |          |                    |          |                    |         |                   |         |                   |  |  |         |                   |          |                    |             |              |           |
|   |  | Pengadaan Mebel   | Terpenuhi nya Mobiler Kantor   | 1 paket  | 283,901,000          | -        | -                  | 1 paket  | -                  | -       | -                 | -       |                   |  |  | -       | -                 | -        | -                  | -           | DPM PTS P    |           |
|   |  | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya                       | Tersedian ya Peralatan Kantor  | 3 unit   | 295,075,000          | -        | -                  | 3 unit   | -                  | -       | -                 | -       |                   |  |  | -       | -                 | -        | -                  | -           | DPM PTS P    |           |
| 6 |  | <b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b> | <b>Persentase Tersedian ya Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b> |          | <b>1,618,600,000</b> |          | <b>276,219,154</b> |          | <b>202,714,000</b> |         | <b>66,635,371</b> |         | <b>23,066,395</b> |  |  |         | <b>89,701,766</b> |          | <b>365,920,920</b> | <b>3.50</b> | <b>0.449</b> |           |
|   |  | Penyediaan Jasa Surat Menyurat                              | Terdistrib usinya Surat Keluar dan Tercukupi nya Benda Pos             | 12 hulan | 32,200,000           | 12 hulan | 500,000            | 12 hulan | 280,000            | -       | -                 | -       | -                 |  |  |         | -                 | 12 hulan | 500,000            | 1.00        | 0.02         | DPM PTS P |
|   |  | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik     | Lancarnya Penyediaan n Telepon, Internet, Air dan Listrik              | 12 bulan | 271,400,000          | 12 bulan | 38,354,154         | 12 bulan | 58,800,000         | 3 bulan | 7,153,401         | 3 bulan | 7,538,816         |  |  | 3 bulan | 14,692,217        | 15 bulan | 53,046,371         | 1.25        | 0.20         | DPM PTS P |
|   |  | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                       | Terwujud nya Jasa Pelayanan ADM Perkantoran yang Efektif dan Efisien   | 12 bulan | 1,315,000,000        | 12 bulan | 237,365,000        | 12 bulan | 143,634,000        | 3 bulan | 59,481,970        | 3 bulan | 15,527,579        |  |  | 3 bulan | 75,009,549        | 15 bulan | 312,374,549        | 1.25        | 0.24         | DPM PTS P |



|            |  |  |  |          |                      |          |                    |          |                    |         |                   |         |                   |  |  |  |         |                   |          |                    |              |             |           |
|------------|--|--|--|----------|----------------------|----------|--------------------|----------|--------------------|---------|-------------------|---------|-------------------|--|--|--|---------|-------------------|----------|--------------------|--------------|-------------|-----------|
| 7          |  | <b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>                                       | <b>Persentase Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>            |          | <b>2,784,000,000</b> |          | <b>166,250,670</b> |          | <b>118,526,000</b> |         | <b>30,758,750</b> |         | <b>21,099,000</b> |  |  |  |         | <b>51,857,750</b> |          | <b>218,108,420</b> | <b>2.000</b> | <b>0.31</b> |           |
|            |  | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Terawatnya dan Terpeliharanya serta terlaksananya Pembayaran Pajak Kendaraan Dinas | 12 bulan | 829,000,000          | 20 surat | 160,820,670        | 12 bulan | 116,456,000        | 3 bulan | 30,758,750        | 3 bulan | 20,369,000        |  |  |  | 3 bulan | 51,127,750        | 15 bulan | 211,948,420        | 0.75         | 0.26        | DPM PTS P |
|            |  | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya   | Terpelihara dan Terawatnya Peralatan Mesin Kantor                                  | 12 bulan | 124,000,000          | 15 unit  | 5,430,000          | 12 bulan | 2,070,000          | -       | -                 | -       | -                 |  |  |  | 3 bulan | 730,000           | 15 bulan | 6,160,000          | 1.25         | 0.05        | DPM PTS P |
|            |  | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya   | Terpelihara dan Terawatnya Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya                      | 6 bulan  | 1,831,000,000        | -        | -                  | -        | -                  | -       | -                 | -       | -                 |  |  |  |         | -                 | -        | -                  | -            | -           | DPM PTS P |
| <b>I I</b> |  | <b>Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal</b>  | <b>Persentase pengembangan iklim penanaman modal</b>                               |          | <b>1,731,330,000</b> |          | <b>0</b>           |          | <b>11,777,550</b>  |         | <b>-</b>          |         | <b>0</b>          |  |  |  |         |                   |          | <b>-</b>           | <b>-</b>     |             |           |

|   |  |   |             |             |   |   |             |            |   |   |   |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                 |
|---|--|---|-------------|-------------|---|---|-------------|------------|---|---|---|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-----------------|
| 8 | Penetapan Kebijakan Daerah mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal | Terlaksanaan pembentukkan kebijakan dan sosialisasi kebijakan penanaman modal |             | 793,760,000 | - | - |             | 11,777,550 |   | - |   |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                 |
|   | Penetapan Kebijakan Daerah mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal | Tersedianya Kebijakan di Bidang Penanaman Modal                               | 3 Kebijakan | 531,260,000 | - | - | -           | -          | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  | DPM<br>PTS<br>P |
|   | Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal                | Terlaksanaan sosialisasi dan penyuluhan                                       | 6 pertemuan | 262,500,000 | - | - | 1 pertemuan | 11,777,550 | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  | DPM<br>PTS<br>P |
| 9 | Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota  | Tersedianya peta potensi investasi  |             | 937,570,000 |   | - |             | -          |   | - |   |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                 |
|   | Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota                                  | tersusunnya Peraturan Daerah (Perda) Rencana Umum                             | 1 dokumen   | 470,000,000 | - | - | -           | -          | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  | DPM<br>PTS<br>P |



|            |  |  |  |            |                    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |  |   |  |   |  |   |                 |
|------------|--|--|--|------------|--------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|--|--|---|--|---|--|---|-----------------|
|            |  | n Modal Daerah Kabupaten /Kota   | Even Nasional dan Regional   |            |                    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |  |   |  |   |  |   |                 |
| <b>I V</b> |  | <b>Program Pelayanan Penanaman Modal</b>   | <b>Persentase Indeks Kepuasan Masyarakat</b>   |            | <b>610,000,000</b> |   | - |   | - |   | - |   |   |   |  |  |   |  | - |  |   | -               |
| <b>1 1</b> |  | <b>Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota</b> | <b>Terlaksanaan pelayanan perizinan dan non perizinan secara terpadu satu pintu dibidang penanaman modal</b>   |            | <b>610,000,000</b> |   | - |   | - |   | - |   |   |   |  |  |   |  |   |  | - | -               |
|            |  | Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik            | Pemanfaatan aplikasi perizinan elektronik berbasis teknologi informasi dalam proses pelayanan perizinan dan non perizinan sesuai ketentuan yang berlaku (OSS dan SiCantik) | 3 aplikasi | 179,000,000        | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  | - |  |   |  | - | -               |
|            |  |  |  |            |                    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |  |   |  |   |  |   | DPM<br>PTS<br>P |

|  |  |   |  |                   |             |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |                 |
|--|--|---|--|-------------------|-------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|-----------------|
|  |  | Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal   | Pelayanan perizinan dan non perizinan terhadap pelaku usaha Mikro/kecil dan skala investasi (Menengah/ besar yang memuask an)    | 1150 dokumen      | 166,000,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | DPM<br>PTS<br>P |
|  |  | Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan pengaduan Masyarakat Terhadap Layanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan | Tersedian ya Layanan Konsultasi dan terkelolaa ya Pengaduan masyarakat Terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan    | 15 pengaduan      | 100,000,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | DPM<br>PTS<br>P |
|  |  | Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan pemberian Fasilitas/Insentif Daerah   | Terlaksana nya koordinasi dan fasilitasi terhadap timteknis Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang merupaka n Represent asi perangkat | 6 rapat 36 survey | 165,000,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | DPM<br>PTS<br>P |

|    |  |  |  |             |               |             |             |   |   |   |            |   |   |   |            |   |             |      |       |   |   |                 |
|----|--|--|--|-------------|---------------|-------------|-------------|---|---|---|------------|---|---|---|------------|---|-------------|------|-------|---|---|-----------------|
|    |  |  | daerah/in stansi teknis dalam proses Perizinan dan Non Perizinan secara terpadu di Kabupaten Lima Puluh Kota |             |               |             |             |   |   |   |            |   |   |   |            |   |             |      |       |   |   |                 |
| V  |  | Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal                                       | Persentase Realisasi Investasi   |             | 1,157,130,000 | 382,182,500 | 500,800,000 |   | - |   | 99,650,000 |   |   |   | 99,650,000 |   | 481,832,500 | 3.63 | 1.013 |   |   |                 |
| 12 |  | Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota | Terlaksana any Pembinaan, Pemanntuan dan Pengawasan Penanaman Modal;   |             | 1,157,130,000 | 382,182,500 | 500,800,000 |   | - |   | 99,650,000 |   |   |   | 99,650,000 |   | 481,832,500 | 3.63 | 1.013 |   |   |                 |
|    |  | Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal                     | Jumlah investor yang menyampaikan Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) dan nilai realisasi investasi      | 70 investor | 234,266,000   | 0           | -           | - | - | - | -          | - | - | - | -          | - | -           | -    | -     | - | - | DPM<br>PTS<br>P |

|           |  |  |  |                |                    |  |             |                  |                  |   |          |                  |            |  |  |  |  |            |                  |             |      |      |                 |  |
|-----------|--|--|--|----------------|--------------------|--|-------------|------------------|------------------|---|----------|------------------|------------|--|--|--|--|------------|------------------|-------------|------|------|-----------------|--|
|           |  | Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal                                | Laporan hasil pembinaan dalam memfasilitasi penyelesaian permasalahan penanaman modal                    | 200 perusahaan | 576,000,000        | 480 Pelaku Usaha dalam 10 Kali Sosialisasi | 229,291,200 | 150 Pelaku Usaha | 330,100,000      | - | -        | 451 Pelaku Usaha | 98,750,000 |  |  |  |  | 98,750,000 | 931 Pelaku Usaha | 328,041,200 | 2.40 | 0.57 | DPM<br>PTS<br>P |  |
|           |  | Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal                               | Kesesuaian pelaksanaan kegiatan Penanaman Modal dengan dokumen Perizinan yang dimiliki oleh pelaku usaha | 105 Perusahaan | 346,864,000        | 129 perusahaan                             | 152,891,300 | 70 pelaku Usaha  | 170,700,000      | - | -        | 3 Pelaku Usaha   | 900,000    |  |  |  |  | 900,000    | 132 perusahaan   | 153,791,300 | 1.23 | 0.44 | DPM<br>PTS<br>P |  |
| <b>VI</b> |  | <b>Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal</b>                             | <b>Jumlah Data Laporan Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal</b>                                   |                | <b>397,604,880</b> |  | <b>-</b>    |                  | <b>5,000,000</b> |   | <b>-</b> |                  | <b>-</b>   |  |  |  |  |            |                  | <b>-</b>    |      |      |                 |  |
| <b>13</b> |  | <b>Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat</b> | <b>Tersedia nya Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayana</b>              |                | <b>397,604,880</b> |  | <b>-</b>    |                  | <b>5,000,000</b> |   | <b>-</b> |                  | <b>-</b>   |  |  |  |  |            |                  | <b>-</b>    |      |      |                 |  |

|  | Daerah Kabupaten/Kota  | n Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang Diolah Dikaji dimanfaatkan  |            |             |   |   |            |           |   |   |   |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                 |  |
|--|--|--|------------|-------------|---|---|------------|-----------|---|---|---|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-----------------|--|
|  | Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik | Adanya Laporan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang sudah diterbitkan | 19 Laporan | 397,604,880 | - | - | 19 Laporan | 5,000,000 | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | DPM<br>PTS<br>P |  |
| <b>Rata-rata capaian kinerja (%)</b>   |  |  |            |             |   |   |            |           |   |   |   |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                 |  |
| <b>Predikat Kinerja</b>  |  |  |            |             |   |   |            |           |   |   |   |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                 |  |
| Faktor pendorong keberhasilan kerja :  |  |  |            |             |   |   |            |           |   |   |   |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                 |  |
| Faktor penghambat pencapaian kinerja :   |  |  |            |             |   |   |            |           |   |   |   |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                 |  |
| Tindak Lanjut yang di perlukan dalam triwulan berikutnya :                             |  |  |            |             |   |   |            |           |   |   |   |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                 |  |
| Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja Perangkat Daerah Kabupaten/kota berikutnya : |  |  |            |             |   |   |            |           |   |   |   |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                 |  |





## 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan DPMPTSP

---

Peningkatan investasi di bidang Penanaman Modal dan Pelayanan perizinan akan terlihat apabila didukung dengan faktor-faktor yang mempengaruhi investasi baik faktor luar maupun dalam negeri terutama faktor keamanan, politik, dan kepastian hukum. Kabupaten Lima Puluh Kota mempunyai peluang untuk menarik investasi karena memiliki berbagai potensi sumber daya alam yang masih dapat dikembangkan dalam bentuk usaha yang prospektif dan diminati oleh pasar baik dalam maupun luar negeri.

Potensi yang dimiliki Kabupaten Lima Puluh Kota dan mempunyai keunggulan adalah disektor pertambangan, kehutanan, energi, pertanian, peternakan dan perikanan, sektor pariwisata, sektor jasa dan perdagangan. Dari sektor potensi diatas maka dapat mendorong pertumbuhan investasi terutama investasi dibidang agraris sesuai dengan Misi Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota yang memerlukan fasilitas PMA/PMDN.

Menarik investor untuk berinvestasi di Kabupaten Lima Puluh Kota, diperlukan kerja keras dan keterlibatan semua pihak yang terkait. Selain itu diperlukan perbaikan-perbaikan iklim investasi yang kondusif, ditetapkan dan diperbaharuinya Peraturan Daerah tentang Investasi Daerah sehingga sasaran investasi dapat terwujud.

Sesuai Visi dan Misi Kabupaten Lima Puluh Kota selanjutnya dijabarkan dalam RENSTRA DPMPTSP Tahun 2021– 2026 maka disusun target indikator sasaran sebagai berikut:

Tabel 2.2

TC. 25

## Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah

| No | Tujuan  | Sasaran  | Indikator Tujuan/Sasaran                               | Target Kinerja Tujuan/Sasaran Pada Tahun ke- |                 |                 |                 |                 | Target Akhir Renstra |
|----|---|--|--|--|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|----------------------|
|    |   |  |  | Tahun 2022                                   | Tahun 2023      | Tahun 2024      | Tahun 2025      | Tahun 2026      |                      |
| 1  | 2   | 3  | 4  | 5  | 6               | 7               | 8               | 9               | 10                   |
| 1  | Meningkatnya Investasi                                  | Meningkatnya Nilai Investasi dan Realisasi Investasi | - Nilai rencana investasi berskala nasional (PMDN/PMA) | 401.035.530.807                              | 421.087.307.347 | 442.141.672.715 | 464.248.756.350 | 487.461.194.168 | 487.461.194.168      |
|    |   |  | - Nilai Realisasi Investasi PMDN                       | 380.165.883.910                              | 399.174.178.105 | 419.132.887.011 | 440.089.531.361 | 462.094.007.929 | 462.094.007.929      |
|    |   |  | PMA  | 2.294.974.419                                | 2.409.723.140   | 2.530.209.292   | 2.656.719.761   | 2.789.555.749   | 2.789.555.749        |
|    |   |  | - Jumlah investor berskala nasional (PMDN/PMA)         | 3.073  | 3.226           | 3.388           | 3.557           | 3.735           | 3.735                |
| 2  | Meningkatnya Mutu Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan | Meningkatnya Indeks Kepuasan Masyarakat              | Indeks Kepuasan Masyarakat                             | 84,9   | 85              | 85,2            | 85,3            | 85,3            | 84,9                 |
| 3  | Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja DPMTSP               | Meningkatnya Nilai SAKIP OPD                         | Nilai SAKIP OPD  | 71   | 71              | 72              | 72              | 72              | 71                   |

Merujuk kepada gambaran umum atau kondisi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu kedepan, ditujukan untuk mewujudkan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan yang terarah, konsisten, terpadu dan berkelanjutan. Yaitu suatu pelayanan yang disusun sesuai dengan mekanisme dan prosedur yang berlaku menurut ketentuan perundang-undangan dan dalam rangka mendapatkan pelayanan yang mampu menyelesaikan permasalahan dan memenuhi aspirasi masyarakat. Dengan kata lain penanaman modal dan pelayanan perizinan disusun harus memiliki arah dan tujuan yang jelas dan mampu menjadi pedoman dan pendorong pelaksanaan kegiatan pembangunan daerah kedepan.

Karena itu perlu diwujudkan konsistensi penanaman modal dan pelayanan perizinan melalui keterpaduan antar berbagai pihak yang terkait dengan penanaman modal dan pelayanan perizinan sehingga menciptakan sinkronisasi dan sinergitas. Upaya yang mesti dilakukan adalah meningkatkan kualitas dan koordinasi penyusunan perencanaan penanaman modal dan pelayanan perizinan yang baik dan terarah.

Evaluasi kinerja berdasarkan target Pencapaian Renstra DPMPTSP Tahun 2021-2026 Kabupaten Lima Puluh Kotayaitu sesuai dengan Indikator Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu mengaju pada Tujuan dan Sasaran RPJMD. Secara umum dapat dilihat pada Tabel berikut :

Tabel 2.3

TC.30

## Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lima Puluh Kota

| No | Indikator  | SPM/Standar Nasional | IKD | Target Renstra Perangkat Daerah |                 |                 |                 | Realisasi Capaian |                   | Proyeksi          |                   | Catatan Analisis |
|----|--|----------------------|-----|---------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|
|    |  |                      |     | Tahun 2021                      | Tahun 2022      | Tahun 2023      | Tahun 2024      | Tahun 2021        | Tahun 2022        | Tahun 2023        | Tahun 2024        |                  |
| 1  |  | 3                    | 4   | 5                               | 6               | 7               | 8               | 10                | 11                | 12                | 13                | 14               |
| 1  | Jumlah investor berskala nasional (PMDN/PMA)                                       |                      | IKD | 2.926                           | 3.073           | 3.226           | 3.388           | 3.040             | 7.848             | 5.000             | 6.000             |                  |
| 2  | Jumlah Nilai Investasi berskala nasional (PMDN/PMA)                                |                      | IKD | 381.938.600.769                 | 401.035.530.807 | 421.087.307.347 | 442.141.672.715 | 693,14            | 4.561.817.738.404 | 4.190.000.000.000 | 4.220.000.000.000 |                  |
| 3  | Nilai realisasi investasi (PMDN)   |                      | IKD | 362.062.746.581                 | 380.165.883.910 | 399.174.178.105 | 419.132.887.011 | 900,25            | 4.558.005.879.329 | 442.141.672.715   | 464.248.756.350   |                  |
| 4  | Nilai realisasi investasi (PMA)  |                      | IKD | 2.185.689.923                   | 2.294.974.419   | 2.409.723.140   | 2.530.209.292   | 15,28             | 3.811.859.075     | 2.530.209.292     | 2.656.719.761     |                  |
| 5  | Skor Indeks Kepuasan Masyarakat  |                      | IKD | 90                              | 84,9            | 85              | 85              | 85,07             | 84,8              | 85                | 85,2              |                  |
| 6  | Nilai akuntabilitas kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu |                      | IKD | 70                              | 71              | 71              | 71              | 69,33             | 69,33             | 71                | 72                |                  |

## A. Analisis dan Capaian Kinerja

### Sasaran Strategis 1 : Meningkatnya Investasi

#### 1. Jumlah investor berskala nasional (PMDN/PMA)

Jumlah investor dihitung dari banyak nya jumlah pengurusan NIB yang terjadi pada tahun itu dan diakumulasikan dengan tahun tahun sebelumnya (2018 sampai 2021). Pada tahun 2021 jumlah investor 5.623, tahun 2022 sebanyak 7.848 berarti terjadi peningkatan sebanyak 2.225 dengan persentase peningkatan sebanyak 39,53%

#### 2. Jumlah Nilai investasi berskala nasional (PMDN/PMA), mengacu pada total investasi yang diusulkan atau diajukan oleh investor dan itupun disetujui oleh Dinas Penanaman Modal atau Lembaga, dimana nilai investasi ini bersifat provisional, Nilai tersebut dapat berubah seiring dengan perkembangan proyek dan kemungkinan perubahan dalam skala atau rencana investasi . Tahun 2021 total nilai investasi sebesar Rp. 4.385.295.689.044 dan tahun 2022 Rp. 4.561.817.738.404 dengan demikian terjadi peningkatan sebesar 4,02%. Peningkatan ini terjadi karena peningkatan promosi dan sosialisasi serta bimbingan teknis penanaman modal yang dilaksanakan dengan Dana Alokasi Khusus.

#### 3. Nilai Realisasi Investasi PMDN.

Nilai realisasi investasi tahun 2021 sebesar 4.528.673.116.843 dan tahun 2022 sebesar 5.173.426.051.626 dengan demikian terjadi peningkatan realisasi investasi sebesar 4,15%. Realisasi investasi dihitung berdasarkan laporan LKPM yang dilakukan oleh investor dan ditambah dengan jumlah nilai investasi yang dilaporkan oleh investor pada saat pengurusan Nomor Induk Berusaha.

#### 4. Nilai realisasi investasi PMA

Pada tahun 2021 nilai realisasi PMA sebesar 9.059.016.004 dan tahun 2022 sebesar 3.811.859.075. Untuk menghitung persentase peningkatan kita perlu melakukan :

hitung selisih nilai tahun 2022 dan tahun 2021, bagi nilai selisih nya dengan nilai tahun 2021, kalikan hasilnya dengan 100. Karena hasilnya negatif menunjukkan adanya

Penurunan nilai PMA daripada peningkatan. Untuk menghitung persentase penurunan kita mengambil nilai Absolut dari selisih tersebut. Selisih =  $|-6.047.156.929| = 6.047.156.929$ , maka persentase peningkatan

= (selisih/nilai PMA tahun 2021) x 100

=  $(6.047.156.420 / 9.059.016.004) \times 100$

= 66,68%

Jadi persentase peningkatan PMA dari tahun 2021 ke Tahun 2022 sebesar 66,68% (dengan asumsi nilai PMA tahun 2022 sebenarnya adalah 3.011.859.075)

### **Sasaran Strategis 2. Meningkatnya Mutu Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan**

#### Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat

Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) adalah data dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran pendapat masyarakat terhadap pelayanan perizinan dan nonperizinan dari aparatur penyelenggara pelayanan publik pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lima Puluh Kota. Hasil pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) ini merupakan tolok ukur evaluasi pelaksanaan pelayanan perizinan dan non perizinan untuk masa berikutnya.

Untuk tahun 2022, Bulan Januari sampai Juni nilai IKM sebesar 86,506, bulan Juli sampai Desember nilainya 83,121. Untuk menghitung total IKM maka dijumlahkan semester satu dan semester, dua dibagi dua. Maka total IKM 84,8. Pada tahun 2021 nilai IKM sebesar 85,07, dengan demikian terjadi penurunan nilai IKM sebesar 0,32% hal ini antara lain penyebabnya adalah sistem yang masih belum lancar, dimana kita masih memakai sistem dari pusat kadang kala terjadi Mainten nence sehingga pelayanan terlambat.

### **Sasaran Strategis 3 : Meningkatnya akuntabilitas kinerja DPMPTSP**

Dalam penilaian akuntabilitas kinerja Organisasi Perangkat Daerah dilakukan oleh Inspektorat Daerah dengan memperhatikan beberapa indikator penilaian dan bobot. Bobot dan Nilai DPMPTSP Tahun 2021 sebagai berikut :

| No. | Indikator Penilaian                   | Bobot% | Nilai % |
|-----|---------------------------------------|--------|---------|
| 1   | Perencanaan kinerja                   | 30     | 22,54   |
| 2   | Pengukuran kinerja                    | 25     | 14,38   |
| 3   | Pelaporan kinerja                     | 15     | 10,42   |
| 4   | Evaluasi internal                     | 10     | 5,50    |
| 5   | Pencapaian sasaran/kinerja organisasi | 20     | 16,99   |

Dilihat dari tabel diatas maka capaian 5 indikator kinerja sasaran strategis sebesar **69,33**. Sesuai dengan kategori penilaian keberhasilan/kegagalan yang ditetapkan, pencapaian sasaran ini termasuk berhasil dengan kategori penilaian B. Ditahun 2020 nilai Akuntabilitas Kinerja sebesar 69,08. Dengan demikian persentase peningkatan sebesar 0.36%.

### 2.3 Isu – Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD

---

Isu strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lima Puluh Kota dalam melaksanakan pelayanan perizinan dan investasi adalah sebagai berikut :

1. Jumlah Sumber Daya Manusia yang masih kurang terutama Sumber Daya Manusia yang berkaitan dengan pelayanan perizinan.
2. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2012 tentang RTRW Kabupaten Lima Puluh Kota sudah tidak sesuai dengan perkembangan, kondisi dan kebutuhan masyarakat saat ini sehingga perlu dilakukan Peninjauan Kembali (PK) dan Perubahan terhadap Perda Nomor 7 Tahun 2012.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha terintegrasi secara elektronik melalui sistem OSS mengamanatkan kepada setiap Pemerintah Daerah untuk menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) dan disampaikan secara digital kepada lembaga OSS sebagai dasar dan acuan penetapan kesesuaian peruntukan ruang terhadap sector usaha yang dimohonkan.
4. Perlunya Sosialisasi peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penanaman modal dan pelayanan perizinan.



5. Perlunya koordinasi dengan OPD terkait dalam melakukan pembinaan, pengawasan, dan penertiban terhadap usaha/pelaku usaha yang belum memiliki izin atau izin yang telah habis masa berlakunya.
6. Untuk meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia maka perlu diadakan pelatihan dan bimbingan teknis setiap tahunnya sehingga pelayanan akan semakin optimal terutama dalam penyelenggaraan perizinan secara elektronik sesuai ketentuan dan peraturan yang berlaku.
7. Belum mendukungnya sarana dan prasarana penunjang (ruang pelayanan, ruang rapat).
8. Perlunya dilakukan FS ( Feasibility Study) guna peningkatan rencana investasi

Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi DPMPTSP Kabupaten Lima Puluh Kota dalam menyelenggarakan tugas pokok yaitu membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan bidang Penanaman Modal yang menjadi kewenangan Kabupaten Lima Puluh Kota, DPMPTSP Kabupaten Lima Puluh Kota mempunyai fungsi sebagai berikut :

1. Perumusan kebijakan teknis di bidang Pelayanan Perizinan dan Penanaman Modal;
2. Pembinaan dan Pengkoordinasian penerapan standar teknis Perizinan Terpadu;
3. Pelayanan penunjang penyelenggaraan pemerintahan kabupaten di bidang penanaman modal;
4. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang penanaman modal;
5. Penyelenggaraan pelayanan administrasi perizinan dan non perizinan;
6. Pelaksanaan koordinasi proses pelayanan perizinan dan non perizinan;
7. Pelaksanaan administrasi pelayanan perizinan dan non perizinan;
8. Pemantauan dan evaluasi proses pemberian pelayanan perizinan dan non perizinan;

9. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan ruang lingkup bidang tugasnya.

Dalam menjalankan fungsi tersebut diatas ada beberapa isu isu penting :

1. Jumlah Sumber Daya Manusia yang masih kurang terutama Sumber Daya Manusia yang berkaitan dengan pelayanan perizinan.
2. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2012 tentang RTRW Kabupaten Lima Puluh Kota sudah tidak sesuai dengan perkembangan, kondisi dan kebutuhan masyarakat saat ini sehingga perlu dilakukan Peninjauan Kembali (PK) dan Perubahan terhadap Perda Nomor 7 Tahun 2012.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha terintegrasi secara elektronik melalui sistem OSS mengamanatkan kepada setiap Pemerintah Daerah untuk menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) dan disampaikan secara digital kepada lembaga OSS sebagai dasar dan acuan penetapan kesesuaian peruntukan ruang terhadap sektor usaha yang dimohonkan.
4. Perlunya Sosialisasi peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penanaman modal dan pelayanan perizinan.
5. Perlunya koordinasi dengan OPD terkait dalam melakukan pembinaan, pengawasan, dan penertiban terhadap usaha/pelaku usaha yang belum memiliki izin atau izin yang telah habis masa berlakunya.
6. Untuk meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia maka perlu diadakan pelatihan dan bimbingan teknis setiap tahunnya sehingga pelayanan akan semakin optimal terutama dalam penyelenggaraan perizinan secara elektronik sesuai ketentuan dan peraturan yang berlaku.
7. Belum mendukungnya sarana dan prasarana penunjang (ruang pelayanan, ruang rapat).
8. Perlunya dilakukan FS ( Feasibility Study) guna peningkatan rencana investasi.

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi di atas maka kinerja pelayanan pada DPMPSTP lebih difokuskan pada pelayanan administrasi perizinan yang dilaksanakan sehingga dapat meningkatkan nilai investasi dan realisasi investasi yang kinerjanya diukur dari

peningkatan nilai investasi dan peningkatan realisasi investasi setiap tahunnya, baik itu dari segi persentase pertumbuhan jumlah PMA dan PMDN dari tahun ke tahun. Kinerja DPMPTSP Kabupaten Lima Puluh Kota juga dapat diukur dari pelayanan yang diberikan kepada investor baik dalam proses perizinan dan non perizinan maupun dalam menyelesaikan permasalahan yang mereka hadapi dalam merealisasikan investasinya di Kabupaten Lima Puluh Kota. Tolok ukur kinerja lainnya adalah dalam pelayanan perizinan yang diberikan kepada investor yang diukur dengan Indeks Kepuasan Masyarakat.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi dalam pencapaian target kinerja DPMPTSP Kabupaten Lima Puluh Kota melakukan koordinasi dan sinergi program dengan perangkat daerah Provinsi (DPMPTSP Prov Sumatera Barat) dan dengan kementerian dan Lembaga Terkait (BKPMRI).

### 2.3.1 Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan Tugas dan Fungsi DPMPTSP Kabupaten Lima Puluh Kota

**Tabel 2.3.1**

**Data Permasalahan Untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah**

| No. | Masalah Pokok                               | Masalah   | Akar Masalah   |
|-----|---|---|--|
| 1   | 2   | 3   | 4  |
| 1   | Belum optimalnya pengelolaan potensi daerah | Belum optimalnya perencanaan investasi dan pengembangan penanaman modal | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Belum adanya RUPM (Rencana Umum Penanaman Modal)</li> <li>- SOP Perizinan dan Non perizinan yang belum terintegrasi dengan OPD terkait</li> <li>- OPD teknis belum ditempatkan di DPMPTSP</li> <li>- Desain promosi yang belum dirumuskan secara optimal</li> <li>- Belum optimalnya</li> </ul> |

|   |                                     |  |   |
|---|-------------------------------------|--|---|
|   |                                     |  | <p>koordinasi dengan BKPMRI maupun Propinsi</p> <p>Sarana dan prasarana yang kurang memadai</p> <p>Belum adanya kajian potensi produk unggulan daerah</p> <p>Belum tegasnya sistem sanksi dalam implementasi sehingga memperlemah kesadaran PMA/PMDN dalam menyampaikan LKPM</p> <p>Belum memadainya kualitas dan kuantitas SDM</p> |
| 2 | Rendahnya kualitas pelayanan publik | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Belum Representatifnya Sarana dan Prasarana Gedung/Ruang Pelayanan Perizinan DPM &amp; PTSP</li> <li>2. Belum Semua Penerbitan Izin sesuai dengan Standar Pelayanan (SP) dan Standar Operasional Prosedur (SOP)</li> </ol> | <p>Masih belum optimalnya Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu (PTSP)</p> <p>Masih belum adanya kemudahan, kepastian dan transparansi proses perizinan bagi investor dan pengusaha</p> <p>Belum terintegrasinya SOP perizinan dengan OPD terkait</p> <p>Peraturan K / L yang sering berubah menuntut penyesuaian di Daerah.</p>   |

Dari table diatas dapat dilihat bahwa :

- a. Belum optimalnya kapasitas, kualitas, kuantitas dan pemerataan SDM dalam pencapaian tujuan dan sasaran organisasi;
- b. Belum optimalnya sinergitas, integrasi, dan koordinasi penyelenggaraan pelayanan perizinan;
- c. Semakin meningkatnya tuntutan masyarakat terhadap kualitas pelayanan perizinan yang didukung oleh e-service;

### **2.3.2 Dampak terhadap pencapaian Visi dan Misi Bupati dan terhadap capaian nasional/internasional.**

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu melaksanakan Misi ke-4 : Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik melalui Reformasi Birokrasi seutuhnya.

Tujuan : Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik

Sasaran :

1. Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah
2. Meningkatnya kualitas pelayanan publik

Sesuai dengan visi Bupati dan Wakil Bupati terpilih, maka visi pembangunan jangka menengah daerah Kabupaten Lima Puluh Kota tahun 2022-2026 adalah:

***“Mewujudkan Lima Puluh Kota Madani, Beradat, dan Berbudaya dalam Kerangka Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah”***

Visi Pembangunan Kabupaten Lima Puluh Kota ini diharapkan akan mewujudkan keinginan dan amanat masyarakat Kabupaten Lima Puluh Kota dengan tetap mengacu pada pencapaian tujuan nasional seperti diamanatkan dalam Pembukaan UUD 1945 khususnya bagi masyarakat Kabupaten Lima Puluh Kota, memperhatikan RPJMN 2020-2025, RPJPD Provinsi Sumatera Barat tahun 2005-2025, dan RPJMD Kabupaten Lima Puluh Kota tahun 2021-2026. Bila Visi dan Misi Bupati tercapai maka akan meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah, meningkatnya kualitas pelayanan publik serta terwujudnya Lima Puluh Kota Madani, beradat dan berbudaya dalam kerangka adat basandi syarak, syarak basandi kitabullah. Berangkat dari rencana pencapaian visi misi Kepala Daerah yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Lima Puluh Kota tahun 2021-2026 bertolak dari kondisi faktual terhadap dokumen dan manajemen Sumber Daya Manusia yang diamanatkan untuk

menunjang percepatan dan kemudahan investasi maka perlu dilakukan secara menyeluruh tata kelola birokrasi pelayanan yang baik dan benar sesuai dengan amanat peraturan perundang undangan. Kesiapan sumber daya / potensi yang terdapat di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu perludilakukan evaluasi secara berkesinambungan untuk mendapatkan suatu kesimpulan yang berpengaruh terhadap penguatan Perangkat Daerah. Bila permasalahan sebagai mana tersebut diatas tidak segera dilakukan pembenahan akan berdampak terhadap pncapaian Visi Misi Kepala Daerah.

### **2.3.3 Tantangan dan Peluang dalam meningkatkan pelayanan DPMPTSP Kabupaten Lima Puluh Kota.**

Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan perangkat daerah : Keberhasilan pembangunan merupakan sasaran prioritas atau target kinerja dipengaruhi oleh berbagai faktor. Untuk itu perlu adanya identifikasi agar dapat diketahui dan ditentukan faktor–faktor yang termasuk dalam kategori Kekuatan, Kelemahan, Peluang dan Ancaman sesuai dengan strategi yang akan ditetapkan.

Hasil identifikasi faktor–faktor yang berpengaruh terhadap keberhasilan pencapaian sasaran dengan menggunakan teknik peta kekuatan (Analisis SWOT). Analisis SWOT adalah metode perencanaan stategis yang digunakan untuk mengevaluasi kekuatan (strengths), kelemahan (weaknesses), peluang (opportunities), dan ancaman (threats) dalam pencapaian target kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Keempat faktor itulah yang membentuk akronim SWOT (strengths, weaknesses, opportunities, dan threats). Proses ini melibatkan penentuan tujuan yang spesifik dan mengidentifikasi faktor internal dan eksternal yang mendukung dan yang tidak dalam mencapai tujuan tersebut. Analisis SWOT dapat diterapkan dengan cara menganalisis dan memilah berbagai hal yang mempengaruhi keempat faktornya, kemudian menerapkannya dalam matrik SWOT, dimana aplikasinya adalah bagaimana kekuatan mampu mengambil keuntungan (advantage) dan mengatasi kelemahan dari peluang yang ada, selanjutnya bagaimana kekuatan mampu menghadapi ancaman dan bagaimana cara mengatasi kelemahan yang adapadaPerubahanRencana Kerja

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2023.

Analisis SWOT dilengkapi dengan informasi yang relevan melalui proses analisis yang seksama untuk kegiatan penilaian situasi kondisi suatu organisasi, dapat tercakup dalam analisis SWOT yang terdiri atas dua kegiatan utama yaitu analisis internal dan analisis eksternal terhadap keberadaan suatu organisasi. Proses analisisnya sendiri bisa dimulai dari internal dan eksternal dulu atau keduanya secara bersama-sama. Kekuatan, dapat diwujudkan sebagai suatu sumber daya, keterampilan/ kemampuan, atau keuntungan. Sedangkan kelemahan dapat didefinisikan sebagai suatu hal batasan atau kekurangan dalam sumber daya, keterampilan/kemampuan yang secara serius merintangangi performansi efektif suatu organisasi. Fasilitas, sumberdaya financial, kapabilitas manajemen, keterampilan, dapat menjadi sumber dari kelemahankelemahan organisasi. Peluang, merupakan suatu kondisi menguntungkan utama dalam lingkungan organisasi tertentu. Sedangkan acaman dapat berwujud sebagai suatu situasi tidak menguntungkan dari lingkungan organisasi tertentu, dapat juga diartikan sebagai rintangan-rintangan kunci terhadap posisi organisasi saat ini dan yang diinginkan.

Dalam rangka meningkatkan pelayanan DPMPTSP Kabupaten Lima Puluh Kota mempunyai tantangan sebagai berikut :

- a. Kebutuhan sarana prasarana yang refresentatif dalam upaya pencapaian optimalisasi pelayanan
- b. Dinamisasi dalam proses penyederhanaan operasional prosedur dalam upaya percepatan pelayanan perizinan
- c. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia pada semua bidang dalam peningkatan pelayanan penanaman modal
- d. Pemutakhiran instrumen , data dan regulasi sesuai dengan perkembangan kebutuhan di DPMPTSP
- e. Kurangnya anggaran untuk pelaksanaan kegiatan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Sedangkan peluang yang ada, antara lain:

- a. Besarnya perhatian dan dukungan pemerintah dalam peningkatan pelayanan dan investasi
- b. Iklim usaha yang kondusif untuk memberikan peluang masuknya investasi
- c. Letak geografis yang strategis dan terbangunnya insfrastruktur transportasi yang baik
- d. Adanya komitmen dari pimpinan dan seluruh aparaturn daerah guna peningkatam pelayanan dan investasi
- e. Struktur kelembagaan yang lebih kondusif dan akomodatif terhadap perkembangan perizinan.

**Tabel 2.3.3.1**  
**SWOT Analisa Internal dan Eksternal**

| <b>KEKUATAN<br/>(Strengths)</b>    |   | <b>KELEMAHAN<br/>(Weaknesses)</b> |  |
|------------------------------------|---|-----------------------------------|--|
| S1                                 | Fasilitas pendukung kerja cukup memadai           | W1                                | Keterbatasan anggaran  |
| S2                                 | Percepatan pelayanan perizinan                    | W2                                | Kesenjangan kuantitas dan kompetensi antar bidang                    |
| S3                                 | Motovasi, semangat dan etos kerja aparaturn       | W3                                | Masih kurangnya tenaga   |
| S4                                 | Pemutakhiran data                                 | W4                                | Perlunya dinamisasi dalam proses penyederhanaan operasional prodesur |
| <b>PELUANG<br/>(Opportunities)</b> |   | <b>ANCAMAN<br/>(Threats)</b>      |  |
| O1                                 | Dukungan Fasilitas Kerja yang Cukup Memadai       | T1                                | Rendahnya Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)                           |
| O2                                 | Adanya Percepatan Pelayanan                       |                                   |  |
| O3                                 | Adanya Kesempatan Untuk Meningkatkan Kualitas ASN |                                   |  |

**Tabel 2.3.3.2**  
**Analisis Strategi dengan Faktor SWOT Matriks SWOT  
(Strengths,Weaknesses,Opportunities,Threats)**



|   |  |  |
|---|--|--|
| <b>INTERNAL</b>   | <b>KEKUATAN<br/>(Strengths)</b>  | <b>KELEMAHAN<br/>(Weaknesses)</b>  |
|   | <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Fasilitas pendukung kinerja yang cukup memadai</li> <li>➤ Kecepatan pelayanan perizinan</li> </ul>      | <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Keterbatasan anggaran</li> <li>➤ Kesenjangan kuantitas dan kompetensi personil antar bidang</li> <li>➤ Masih kurangnya tenaga</li> <li>➤ Perlunya dinamisasi dalam proses penyederhanaan operasional prosedur</li> </ul>        |
| <b>EKSTERNAL</b>  | <b><u>STRATEGIS+O</u></b>  | <b><u>STRATEGIW+O</u></b>  |
| <b>PELUANG<br/>(Opportunities)</b>  | <b><u>STRATEGIS+O</u></b>  | <b><u>STRATEGIW+O</u></b>  |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Dukungan Fasilitas Kerja yang Cukup Memadai</li> <li>➤ Adanya Percepatan pelayanan</li> <li>➤ Adanya Kesempatan Untuk Meningkatkan Kualitas ASN</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Meningkatkan Fasilitas Pendukung Kinerja</li> <li>➤ Melakukan Percepatan Pelayanan Perizinan</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Meningkatkan Anggaran Belanja Perangkat Daerah</li> <li>➤ Mengelola Anggaran yang Berdaya guna serta Efektif dan Efisien Dalam Membangun Jaringan Kerja</li> <li>➤ Menambah Jumlah Tenaga Administrasi dan Pelayanan</li> </ul> |

#### 2.4 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Tabel 2.4

Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2023

| No | Program      | Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Besaran Volume | Catt |
|----|--------------|----------|--------|-------------------|----------------|------|
| 1. | <b>NIHIL</b> |          |        |                   |                |      |

Untuk saat ini belum ada usulan Pokok Pikiran Legislatif yang akan diakomodir dalam Perubahan Rencana Kerja DPMTSP Tahun Anggaran 2023.

# **BAB III**

## **RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DPMPTSP**

### **3.1. Indikator Kinerja Tahun 2023**

---

Sesuai tujuan dan sasaran Rencana Kerja DPMPTSP Tahun 2023 disusun berdasarkan :

1. Pencapaian Visi dan Misi Bupati Kabupaten Lima Puluh Kota;
2. Berkorelasi dan bersinergi dengan kebijakan nasional;
3. Peningkatan tugas pokok dan fungsi kelembagaan DPMPTSP

Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan DPMPTSP Tahun 2023 di rencanakan berjumlah 6 Program, 12 Kegiatan dan 29 Sub Kegiatan dengan total pagu dana/pagu indikatif sebesar Rp.3.854.453.182. Dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lima Puluh Kota yaitu meningkatkan nilai investasi dan realisasi investasi dan meningkatkan Indek Kepuasan, Rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah. Kegiatan diarahkan pada Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, Administrasi Keuangan, Administrasi Kepegawaian, Administrasi Umum, Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah. Program ini diarahkan pada capaian indikator kinerja Meningkatnya nilai LAKIP dan Skor KM dengan target capaian 71 (A)
2. Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal. Program ini kegiatannya diarahkan pada penetapan pemberian fasilitas /insentif dibidang penanaman modal, Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota, yang menjadi

kewenangan daerah kab/kota dengan indikator kinerja peningkatan nilai rencana investasi mikro kecil 80 milyar, menengah besar 500 milyar

3. Program Promosi Penanaman Modal. Kegiatan diarahkan pada penyelenggaraan promosi penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah kab/kota dengan indikator kinerja peningkatan nilai rencana investasi dengan target capaian rencana investasi mikro kecil 80 milyar, menengah besar 500 milyar
4. Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal. Kegiatan ini diarahkan pada Pengelolaan data dan informasi perizinan dan non perizinan yang terintegrasi pada tingkat daerah Kabupaten/Kota dengan indikator kinerja rencana investasi mikro kecil 80 milyar, menengah besar 500 milyar
5. Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal . Kegiatan diarahkan pada pengendalian pelaksanaan penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah kabupaten/kota dengan indikator kinerja peningkatan nilai rencana investasi dan peningkatan nilai realisasi investasi dengan target capaian nilai rencana investasi mikro kecil 80 milyar, menengah besar 500 milyar dan nilai realisasi investasi mikro kecil 70 milyar dan menengah besar 90 milyar.
6. Program Pelayanan Penanaman Modal . Kegiatan diarahkan pada pelayanan perizinan dan non perizinan secara terpadu satu pintu dibidang penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah kabupaten/kota dengan indikator kinerja peningkatan jumlah investor dan target capaian PMA 1, PMDN 10 , mikro kecil 3.000.

Guna tercapainya target indikator tersebut, terlampir Perubahan Rencana Kerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan beserta indikator, target, dan pagu indikatif, RKPDP 2023 dan Perubahan RKPDP 2023 sebagaimana tabel 3.1

**Tabel 3.1 Perubahan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah  
Tahun 2023**

| PROGRAM/<br>KEGIATAN/SUB<br>KEGIATAN   | LOKASI  | INDIKATOR KINERNA<br>PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN  | TARGET CAPAIAN KINERJA |                        | KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF |                             | ALASAN PERUBAHAN |
|--|---------|---|------------------------|------------------------|-------------------------------|-----------------------------|------------------|
|  |         |   | RKPD 2023              | PERUBAHAN RKPD<br>2023 | RKPD 2023 (RP)                | PERUBAHAN RKPD 2023<br>(RP) |                  |
| Program Penunjang<br>Urusan Pemerintah Daerah<br>Kabupaten / Kota                              | DPMPTSP | Persentase Pelaksanaan Penunjang<br>Urusan Pemerintah daerah  | 100%                   | 100%                   | 3,799,260,734                 | 3.336.875.632               |                  |
| Perencanaan,<br>Penganggaran, dan<br>Evaluasi Kinerja Perangkat<br>Daerah                      | DPMPTSP | Persentase Sinergitas Perencanaan dan<br>Evaluasi Pembangunan Daerah  | 85%                    | 85%                    | 53,714,000                    | 7.686.000                   |                  |
| Penyusunan Dokumen<br>Perencanaan Perangkat<br>Daerah  | DPMPTSP | Jumlah Dokumen Perencanaan<br>Perangkat Daerah  | 2 Dokumen              | 2 Dokumen              | 17.243.100                    | 2.686.000                   |                  |
| Koordinasi dan Penyusunan<br>Dokumen RKA-SKPD  | DPMPTSP | Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan<br>Laporan Hasil Koordinasi<br>Penyusunan DokumenRkA-SKPD   | 1 Dokumen              | 1 Dokumen              | 3.039.000                     | 0                           |                  |
| Koordinasi dan Penyusunan<br>Dokumen Perubahan RKA-<br>SKPD                                    | DPMPTSP | Jumlah Dokumen Perubahan RKA-<br>SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi<br>Penyusunan Dokumen RkA-SKPD   | 1 Dokumen              | 1 Dokumen              | 3.015.000                     | 0                           |                  |
| Koordinasi dan Penyusunan<br>DPA-SKPD  | DPMPTSP | Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan<br>Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan<br>Dokumen DPA-SKPD  | 1 Dokumen              | 1 Dokumen              | 4.088.200                     | 0                           |                  |
| Koordinasi dan Penyusunan<br>Perubahan DPA-SKPD  | DPMPTSP | Jumlah Dokumen Perubahan DPA-<br>SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi<br>Penyusunan Dokumen DPA-SKPD   | 1 Dokumen              | 1 Dokumen              | 4.815.000                     | 0                           |                  |
| Koordinasi dan Penyusunan<br>Laporan Capaian Kinerja dan<br>Ikhtisar Realisasi Kinerja<br>SKPD | DPMPTSP | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan<br>Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan<br>Laporan Hasil Koordinasi<br>Penyusunan Laporan Capaian<br>Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja<br>SKPD | 5 Dokumen              | 5 Dokumen              | 8.500.000                     | 0                           |                  |
| Evaluasi Kinerja Perangkat<br>Daerah   | DPMPTSP | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja<br>Perangkat Daerah   | 6 laporan              | 6 laporan              | 13.013.700                    | 5.000.000                   |                  |
| Administrasi Keuangan<br>PerangkatDaerah   | DPMPTSP | Persentase Tersedianya Administrasi<br>Keuangan Daerah  | 100%                   | 100%                   | 2,988,590,234                 | 2.592.636.382               |                  |
| Penyediaan Gaji dan<br>Tunjangan ASN   | DPMPTSP | Jumlah Orang yang Menerima Gaji<br>dan Tunjangan ASN  | 12bulan                | 12bulan                | 2,962,486,334                 | 2.584.980.382               |                  |
| Koordinasi dan Penyusunan<br>Laporan Keuangan Akhir<br>TahunSKPD                               | DPMPTSP | Jumlah Laporan Keuangan Akhir<br>Tahun SKPD dan Laporan Hasil<br>Koordinasi Penyusunan Laporan<br>Keuangan Akhir Tahun SKPD   | 1 laporan              | 1 laporan              | 10,451,00                     | 5.000.000                   |                  |
| Koordinasi dan Penyusunan<br>Laporan Keuangan Bulanan /<br>Triwulanan /Semesteran<br>SKPD      | DPMPTSP | Jumlah Laporan Keuangan<br>Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD<br>dan Laporan Koordinasi Penyusunan<br>Laporan Keuangan<br>Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD                              | 14 Laporan             | 14 Laporan             | 7,805,400                     | 2.656.000                   |                  |

|   |                |  |                 |                 |                    |                    |  |
|---|----------------|--|-----------------|-----------------|--------------------|--------------------|--|
| Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran          | DPMPTSP        | Jumlah Dokumen Pelaporan Dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran                     | 1 Dokumen       | 1 Dokumen       | 7,847,500          | 0                  |  |
| <b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>                        | <b>DPMPTSP</b> | <b>Terpenuhinya sarana penunjang administrasi kepegawaian dinas</b>                    | 15 orang        | 15 orang        | 0                  | 0                  |  |
| Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan              | DPMPTSP        | Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan | 15 orang        | 15 orang        | 0                  | 0                  |  |
| <b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>                               | <b>DPMPTSP</b> | <b>Persentase Tersedianya Administrasi PelayananUmum Perangkat Daerah</b>              | <b>60 bulan</b> | <b>60 bulan</b> | <b>301,456,500</b> | <b>215.313.250</b> |  |
| Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor        | DPMPTSP        | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan    | 1 paket         | 1 paket         | 7,270,000          | 1.001.000          |  |
| Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                            | DPMPTSP        | Jumlah Peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan                               | 1 paket         | 1 paket         | 30,565,900         | 22.000.000         |  |
| Penyediaan Peralatan Rumah Tangga                                       | DPMPTSP        | Jumlah Peralatan Rumah Tangga yang disediakan  | 1 paket         | 1 paket         | 20,000,000         | 0                  |  |
| Penyediaan Bahan Logistik Kantor  | DPMPTSP        | Jumlah Paket bahan Logistik Kantor yang disediakan                                     | 1 Paket         | 1 Paket         | 11,370,600         | 2.990.800          |  |
| Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                                 | DPMPTSP        | Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan                              | 1 paket         | 1 paket         | 34,500,000         | 18.138.700         |  |
| Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan                | DPMPTSP        | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang disediakan           | 240 Dokumen     | 240 Dokumen     | 2,500,000          | 4.000.000          |  |
| Fasilitasi Kunjungan Tamu   | DPMPTSP        | Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu   | 1 Laporan       | 1 Laporan       | 20,000,000         | 5.600.000          |  |
| Penyelenggaraan RapatKoordinasi dan Konsultasi SKPD                     | DPMPTSP        | Jumlah Laporan penyelenggaraan Koordinasi dan Konsultasi SKPD                          | 1 laporan       | 1 laporan       | 175,250,000        | 161.582.750        |  |
| <b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b> | <b>DPMPTSP</b> | <b>Persentase Tersedianya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>   | <b>Baik</b>     | <b>70 Baik</b>  | <b>0</b>           | <b>0</b>           |  |
|   |                |  | <b>%</b>        | <b>100 %</b>    |                    |                    |  |
| Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan                     | DPMPTSP        | Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan                  | 3 unit          | 3 unit          | 0                  | 0                  |  |
| Pengadaan Mebel   | DPMPTSP        | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan   | 26 Unit         | 26 Unit         | 0                  | 0                  |  |
| Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                   | DPMPTSP        | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin lainnya yang Disediakan                                | 12 Unit         | 12 Unit         | 0                  | 0                  |  |

|  |                |  |                   |                  |                    |                    |  |
|--|----------------|--|-------------------|------------------|--------------------|--------------------|--|
| <b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>  | DPMPTSP        | <b>Persentase Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>                                  |                   |                  | <b>238,060,000</b> | <b>202.714.000</b> |  |
| Penyediaan Jasa Surat Menyurat   | DPMPTSP        | Jumlah Laporan Penyediaan jasa Surat Menyurat  | 1 Laporan         | 1 Laporan        | 2,420,000          | 280.000            |  |
| Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik  | DPMPTSP        | Jumlah laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Yang Disediakan                 | 1 laporan         | 1 laporan        | 45,500,000         | 58.800.000         |  |
| Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor  | DPMPTSP        | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa pelayanan Umum Kantor Yang Disediakan                                   | 1 Laporan         | 1 Laporan        | 190,140,000        | 143.634.000        |  |
| <b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>                                       | <b>DPMPTSP</b> | <b>Persentase Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Daerah</b>  |                   |                  | <b>217,440,000</b> | <b>318.526.000</b> |  |
| Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | DPMPTSP        | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya | 20 Unit           | 20 Unit          | 195,480,00         | 116.456.000        |  |
| Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya   | DPMPTSP        | Jumlah Peralatan dan mesin Lainnya yang Dipelihara   | 69 Unit           | 69 Unit          | 21,960,00          | 2.070.000          |  |
| Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya   | DPMPTSP        | Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi                               | 3 unit            | 3 unit           | 0                  | 200.000.000        |  |
| <b>Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal</b>  | <b>DPMPTSP</b> | <b>Persentase pengembangan iklim penanaman modal</b>   | <b>60</b>         | <b>60</b>        | <b>291,895,850</b> | <b>11.777.550</b>  |  |
| <b>Penetapan Kebijakan Daerah mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal</b>              | DPMPTSP        | <b>Terlaksananya pembentukan kebijakan dan sosialisasi kebijakan penanaman modal</b>                   | <b>100 %</b>      | <b>100 %</b>     | <b>212,204,250</b> | <b>11.777.550</b>  |  |
| Penetapan Kebijakan Daerah mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal                     | DPMPTSP        | Jumlah Peraturan Daerah/ Provinsi dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan penanaman Modal     | 4 Dokumen         | 4 Dokumen        | 157,801,700        | 0                  |  |
| Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal                                    | DPMPTSP        | Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Memperoleh Insentif dan Kemudahan Berusaha di Daerah      | 6 kegiatan usaha  | 6 kegiatan usaha | 54,402,550         | 11.777.550         |  |
| <b>Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota</b>   | <b>DPMPTSP</b> | <b>Tersedianya peta potensi investasi</b>  | <b>10 Dokumen</b> | <b>1 Dokumen</b> | <b>79,691,600</b>  | <b>0</b>           |  |
| Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten / Kota  |                | Tersusnya Peraturan Daerah (Perda) Rencana Umum Penanaman Modal Daerah                                 | 1 Dokumen         | 1 Dokumen        | 0                  | 0                  |  |
| Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota   | DPMPTSP        | Tersusnya Peraturan Daerah (Perda) Rencana Umum Penanaman Modal Daerah                                 | 1 Dokumen         | 1 Dokumen        | 79,691,600         | 0                  |  |

|  |               |  |                     |                     |                    |                    |  |
|--|---------------|--|---------------------|---------------------|--------------------|--------------------|--|
| <b>Program Promosi Penanaman Modal</b>   | <b>DPMTSP</b> | <b>Jumlah Peta Potensi Investasi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota</b>  | <b>10 %</b>         | <b>20 %</b>         | <b>245,955,000</b> | <b>0</b>           |  |
| <b>Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota</b>   | <b>DPMTSP</b> | <b>Persentase rencana investasi</b>  | <b>580 milyar</b>   | <b>20 %</b>         | <b>245,955,000</b> | <b>0</b>           |  |
| Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal  | DPMTSP        | Jumlah Peraturan Daerah yang Mengatur Promosi Penanaman Modal Kewenangan Kabupaten/Kota  | 3 Dokumen           | 3 Dokumen           | 62,951,600         | 0                  |  |
| Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota   | DPMTSP        | Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi penanaman Modal Kabupaten/Kota   | 5 Dokumen           | 5 Dokumen           | 183,003,400        | 0                  |  |
| <b>Program Pelayanan Penanaman Modal</b>   | <b>DPMTSP</b> | <b>Persentase Indeks Kepuasan Masyarakat</b>   | <b>20 %</b>         | <b>20 %</b>         | <b>476,010,000</b> | <b>0</b>           |  |
| <b>Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota</b> | <b>DPMTSP</b> | <b>Terlaksananya pelayanan perizinan dan non perizinan secara terpadu satu pintu dibidang penanaman modal</b>  | <b>610</b>          | <b>610</b>          | <b>476,010,000</b> | <b>0</b>           |  |
| Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik            | DPMTSP        | Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Terpadu eprizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan perizinan berusaha Terintegrasi Secara Elektronik | 1200 Pelaku Usaha   | 1200 Pelaku Usaha   | 66,763,000         | 0                  |  |
| Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal  | DPMTSP        | Jumlah Kegiatan Usaha Dari Pelaku Usaha yang Mendapat Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan Berusaha dan Non Perizinan Penanaman Modal                       | 1100 Kegiatan Usaha | 1100 Kegiatan Usaha | 172,543,100        | 0                  |  |
| Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan                      | DPMTSP        | Jumlah Orang yang Memperoleh Layanan Konsultasi dan Terkelolanya Pengaduan Masyarakat Terhadap Pelayanan Terpadu perizinan dan NonPerizinan                    | 15 orang            | 15 orang            | 62,159,100         | 0                  |  |
| Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan pemberian Fasilitas/Insentif Daerah  | DPMTSP        | Jumlah Kegiatan usaha dari pelaku usaha yang melakukan koordinasi dan sinkronisasi penetapan pemberian fasilitas/insentif daerah                               | 12 kegiatan usah    | 12 kegiatan usah    | 174,544,800        | 0                  |  |
| <b>Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal</b>  | <b>DPMTSP</b> | <b>Persentase realisasi investasi</b>  | <b>20 %</b>         | <b>20 %</b>         | <b>370,207,700</b> | <b>0</b>           |  |
| <b>Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota</b>  | <b>DPMTSP</b> | <b>Terlaksananya pembinaan, pemantauan dan pengawasan penanaman modal</b>  | <b>20 %</b>         | <b>20 %</b>         | <b>370,207,700</b> | <b>500.800.000</b> |  |
| Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal   | DPMTSP        | Jumlah Kegiatan Usaha Dari Pelaku Usaha yang Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal                                      | 80 Kegiatan Usaha   | 80 Kegiatan Usaha   | 63,900,000         | 500.800.000        |  |



|  |                |  |                    |                    |                      |                      |  |
|--|----------------|--|--------------------|--------------------|----------------------|----------------------|--|
| Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal  | DPMPTSP        | Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan pembinaan Pelaksanaan penanaman Modal   | 150 pelaku usaha   | 150 pelaku usaha   | 195,307,700          | 0                    |  |
| Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal   | DPMPTSP        | Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan  | 120 kegiatan usaha | 120 kegiatan usaha | 111,000,000          | 330.100.000          |  |
| <b>Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal</b>   | <b>DPMPTSP</b> | <b>Jumlah data laporan perizinan dan non perizinan penanaman modal</b>   | <b>19 laporan</b>  | <b>19 laporan</b>  | <b>60,270,800</b>    | 170.700.000          |  |
| <b>Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>   | <b>DPMPTSP</b> | <b>Jumlah data laporan perizinan dan non perizinan penanaman modal</b>   | <b>19 laporan</b>  | <b>19 laporan</b>  | <b>60,270,800</b>    | <b>5.000.000</b>     |  |
| Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik | DPMPTSP        | Jumlah data dan informasi perizinan dan non perizinan berbasis system pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik yang diolah, dikaji dan dimanfaatkan | 19 laporan         | 19 laporan         | <b>60,270,800</b>    | <b>5.000.000</b>     |  |
| <b>Total</b>   |                |  |                    |                    | <b>5,243,600,084</b> | <b>3.854.453.182</b> |  |

### **3.2 Rencana Kerja dan Pendanaan**

---

Penetapan program, kegiatan dan Sub Kegiatan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu untuk Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu tahun 2023 mengacu kepada program, kegiatan dan sub kegiatan yang ada dalam Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu tahun 2021-2026. Adapun pencantuman nomenklatur program dan kegiatan mengacu kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor. 90 tahun 2019 dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 050-3708 Tahun 2020. Terkait dengan program ini maka program dan kegiatan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dikelompokkan ke dalam 3 bagian, yaitu program, kegiatan dan sub kegiatan pada setiap SKPD yang merupakan program dan kegiatan yang bersifat rutin yaitu Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten /Kota dan program kegiatan yang terkait dengan urusan pemerintahan bidang Pelayanan penanaman modal. Ringkasan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan DPMPTSP pada tahun 2023 dapat dilihat pada:

**Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kabupaten Lima Puluh Kota  
Tahun 2023**

| Kode | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan                                  |  |                |               |                     |               |               |               | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024                          |  | Perangkat Daerah Penanggung Jawab   |  |  |            |            |  |
|------|--|---|----------------------------|-----------------------------------|--|---|--|----------------|---------------|---------------------|---------------|---------------|---------------|------------------|--|--|---|--|--|------------|------------|--|
|      |  |   |                            |                                   |  | Target 2023   |  | Pagu Indikatif |               |                     | Lokasi        | Sumber Dana   | Prioritas     |                  | Target   | Pagu Indikatif                         |   |  |  |            |            |  |
|      |  |   |                            |                                   |  | Semula  | Menjadi  | RKPD 2023      | AP/SD 2023    | RKPD 2023 Perubahan |               |               | Nasional      |                  |  |  |   | Daerah                                       |  |            |            |  |
|      |  |   |                            |                                   |  | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR   |  |                |               |                     |               |               |               |                  |  |  |   |  |  |            |            |  |
| 2    | 18   |   |                            |                                   |  | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL                              |  |                | 5,243,600,084 | 4,782,343,813       | 3,854,453,182 |               |               |                  | 9,133,513,108  |  |   |  |  |            |            |  |
| 2    | 18   | 01  |                            |                                   |  | <b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>      | Perentase Pemenuhan Terhadap Penjang Urusan Pemerintah   | %              | %             | 100 %               | 100 %         | 3,799,260,734 | 3,933,973,513 | 3,336,875,632    |  | 100 %                                  | 7,215,969,108   |  |  |            |            |  |
| 2    | 18   | 01  | 2.01                       |                                   |  | <b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b> | Perentase sinkronisasi perencanaan dan pelaksanaan kinerja perangkat daerah                          | %              | %             | 100 %               | 100 %         | 53,714,000    | 25,000,000    | 7,686,000        |  | 100 %                                  | 133,700,000   |  |  |            |            |  |
| 2    | 18   | 01  | 2.01                       | 01                                |  | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                         | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah  |                |               | 17 Dokumen          | 17 Dokumen    | 17,243,100    | 13,610,000    | 2,586,000        | Kab. Lima Puluh Kota<br>Semua Kecamatan<br>Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum   | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | Perwisata dan Peningkatan Ekonomi Masyarakat | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu | 17 Dokumen | 40,000,000 | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU |
| 2    | 18   | 01  | 2.01                       | 02                                |  | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD                              | Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD                     |                |               | 1 Dokumen           | 1 Dokumen     | 3,039,000     | 0             | 0                | Kab. Lima Puluh Kota<br>Semua Kecamatan<br>Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum   | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | Perwisata dan Peningkatan Ekonomi Masyarakat | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu | 1 Dokumen  | 8,500,000  | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU |
| 2    | 18   | 01  | 2.01                       | 03                                |  | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD                    | Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD |                |               | 1 Dokumen           | 1 Dokumen     | 3,015,000     | 0             | 0                | Kab. Lima Puluh Kota<br>Semua Kecamatan<br>Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum   | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | Perwisata dan Peningkatan Ekonomi Masyarakat | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu | 1 Dokumen  | 10,000,000 | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU |
| 2    | 18   | 01  | 2.01                       | 04                                |  | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD                                      | Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD                     |                |               | 1 Dokumen           | 1 Dokumen     | 4,088,200     | 0             | 0                | Kab. Lima Puluh Kota<br>Semua Kecamatan<br>Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | Perwisata dan Peningkatan Ekonomi Masyarakat | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu | 1 Dokumen  | 8,000,000  | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU |
| 2    | 18   | 01  | 2.01                       | 05                                |  | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD                    | Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD |                |               | 1 Dokumen           | 1 Dokumen     | 4,815,000     | 0             | 0                | Kab. Lima Puluh Kota<br>Semua Kecamatan<br>Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum   | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | Perwisata dan Peningkatan Ekonomi Masyarakat | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu | 1 Dokumen  | 6,200,000  | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU |

**Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kabupaten Lima Puluh Kota  
Tahun 2023**

| Kode            | Urusan/ Bidang/ Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan                               | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan  | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan |                        |                |               |               |  | Kelompok Sasaran                     | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024   |  | Perangkat Daerah Penanggung Jawab                      |                        |                |  |
|-----------------|---|--|----------------------------|-----------------------------------|--|--|------------------------|----------------|---------------|---------------|--|--------------------------------------|---|--|--|------------------------|----------------|--|
|                 |   |  |                            |                                   |  | Target 2023                            |                        | Pagu Indikatif |               | Lokasi        | Sumber Dana  |                                      | Prioritas   |  |  | Target                 | Pagu Indikatif |  |
|                 |   |  |                            |                                   |  | Semula                                 | Menjadi                | RKPD 2023      | APBD 2023     |               |  |                                      | RKPD 2023 Perubahan   | Nasional                                     |  |                        |                | Daerah   |
| 2.18.01.2.01.06 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD |                            |                                   |  | 5 Laporan                              | 5 Laporan              | 8,500,000      | 11,390,000    | 5,000,000     | Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | Perwisata dan Peningkatan Ekonomi Masyarakat | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu | 5 Laporan              | 30,000,000     | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU |
| 2.18.01.2.01.07 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah   | Dokumen SAKIP, Monitoring dan Evaluasi Kegiatan OPD Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah   |                            |                                   |  | 6 Dokumen<br>6 Laporan                 | 6 Dokumen<br>6 Laporan | 13,013,700     | 0             | 0             | Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | Perwisata dan Peningkatan Ekonomi Masyarakat | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu | 6 Dokumen<br>6 Laporan | 31,000,000     | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU |
| 2.18.01.2.02    | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah  | Persentase Tertib Administrasi Keuangan Daerah   | bulan                      |                                   | bulan                                    | 12 bulan                               | 12 bulan               | 2,988,590,234  | 2,938,002,163 | 2,592,636,382 |  |                                      |   |  |  | 12 bulan               | 5,343,069,108  |  |
| 2.18.01.2.02.01 | Persediaan Gaji dan Tunjangan ASN   | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN  |                            |                                   |  | 31 Orang/bulan                         | 36 Orang/bulan         | 2,962,486,334  | 2,933,002,163 | 2,584,980,382 | Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | Perwisata dan Peningkatan Ekonomi Masyarakat | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu | 26 Orang/bulan         | 5,315,569,108  | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU |
| 2.18.01.2.02.05 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD                           | Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD   |                            |                                   |  | 1 Laporan                              | 1 Laporan              | 10,451,000     | 5,000,000     | 5,000,000     | Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | Perwisata dan Peningkatan Ekonomi Masyarakat | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu | 1 Laporan              | 8,500,000      | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU |
| 2.18.01.2.02.07 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD       | Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD                   |                            |                                   |  | 14 Laporan                             | 14 Laporan             | 7,805,400      | 0             | 2,656,000     | Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | Perwisata dan Peningkatan Ekonomi Masyarakat | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu | 14 Laporan             | 9,000,000      | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU |
| 2.18.01.2.02.08 | Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran                        | Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran   |                            |                                   |  | 1 Dokumen<br>1 Laporan                 | 1 Dokumen<br>1 Laporan | 7,847,500      | 0             | 0             | Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | Perwisata dan Peningkatan Ekonomi Masyarakat | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu | 1 Dokumen<br>1 Laporan | 10,000,000     | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU |

|   |    |   |      |  |   |  |          |             |             |             |   |          |             |   |
|---|----|---|------|--|---|--|----------|-------------|-------------|-------------|---|----------|-------------|---|
| 2 | 18 | 1 | 2.05 | <b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b> | Meningkatnya nilai LAKIP  | 71 Baik  | 0 Baik   | 0           | 0           | 0           |   | 71 Baik  | 37,000,000  |   |
| 2 | 18 | 1 | 2.05 | 11   | Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan            | Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan | 10 Orang | 0 Orang     | 0           | 0           | 0 | 10 Orang | 37,000,000  | BINA PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU |
|   |    |   |      |  | Meningkatnya Kapasitas Sumber Daya Aparatur                           | 10 Orang   | 0 Orang  |             |             |             |   |          |             |   |
| 2 | 18 | 1 | 2.06 | <b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>        | Perwujudan Tervolunginya Administrasi Pelayanan Umum Perangkat Daerah | 12 bulan   | 12 bulan | 301,456,500 | 329,599,350 | 215,313,250 |   | 12 bulan | 335,700,000 |   |

**Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kabupaten Lima Puluh Kota  
Tahun 2023**

| Kode            | Ususan/ Bidang Ususan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan           | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan  | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021 | Prakiraan Target RKPD Tahun 2022 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan |             |                |             |                     | Kelompok Sasaran   | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024    |   | Peringkat Target Penanggung Jawab            |  |           |             |  |
|-----------------|--|--|----------------------------|-----------------------------------|----------------------------------|--|-------------|----------------|-------------|---------------------|--|--------------------------------------|---|--|--|-----------|-------------|--|
|                 |  |  |                            |                                   |                                  | Target 2023                            |             | Pagu Indikatif |             |                     |  | Lokasi                               | Sumber Dana   |  | Prioritas  |           | Target      | Pagu Indikatif   |
|                 |  |  |                            |                                   |                                  | Semula                                 | Menjadi     | RKPD 2023      | APBD 2023   | RKPD 2023 Perubahan |  |                                      |   |  | Nasional   | Daerah    |             |  |
|                 |  |  |                            |                                   |                                  |  |             |                |             |                     |  |                                      |   |  |  |           |             |  |
| 2.18.01.2.06.01 | Persediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan |                            |                                   |                                  | 1 Paket                                | 1 Paket     | 2,270,000      | 3,548,000   | 1,001,000           | Kab. Lima Puluh Kota<br>Semua Kecamatan<br>Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | Perwisata dan Peningkatan Ekonomi Masyarakat | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu | 1 Paket   | 10,500,000  | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU |
| 2.18.01.2.06.02 | Persediaan Penalatan dan Perlengkapan Kantor                     | Jumlah Paket Penalatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan                     |                            |                                   |                                  | 1 Paket                                | 1 Paket     | 30,565,900     | 60,867,500  | 22,000,000          | Kab. Lima Puluh Kota<br>Semua Kecamatan<br>Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | Perwisata dan Peningkatan Ekonomi Masyarakat | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu | 1 Paket   | 32,200,000  | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU |
| 2.18.01.2.06.03 | Persediaan Penalatan Rumah Tangga                                | Jumlah Paket Penalatan Rumah Tangga yang Disediakan                                |                            |                                   |                                  | 1 Paket                                | 1 Paket     | 20,000,000     | 0           | 0                   | Kab. Lima Puluh Kota<br>Semua Kecamatan<br>Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | Perwisata dan Peningkatan Ekonomi Masyarakat | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu | 1 Paket   | 15,000,000  | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU |
| 2.18.01.2.06.04 | Persediaan Bahan Logistik Kantor                                 | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan                                 |                            |                                   |                                  | 1 Paket                                | 1 Paket     | 11,370,600     | 6,011,600   | 2,990,800           | Kab. Lima Puluh Kota<br>Semua Kecamatan<br>Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | Perwisata dan Peningkatan Ekonomi Masyarakat | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu | 1 Paket   | 13,000,000  | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU |
| 2.18.01.2.06.05 | Persediaan Barang Cetak dan Penggandaan                          | Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan                          |                            |                                   |                                  | 1 Paket                                | 1 Paket     | 34,500,000     | 21,275,500  | 18,138,700          | Kab. Lima Puluh Kota<br>Semua Kecamatan<br>Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | Perwisata dan Peningkatan Ekonomi Masyarakat | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu | 1 Paket   | 35,500,000  | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU |
| 2.18.01.2.06.06 | Persediaan Bahan Bacaan dan Peratun Perundang-Undangan           | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peratun Perundang-Undangan yang Disediakan         |                            |                                   |                                  | 240 Dokumen                            | 240 Dokumen | 2,500,000      | 0           | 4,000,000           | Kab. Lima Puluh Kota<br>Semua Kecamatan<br>Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | Perwisata dan Peningkatan Ekonomi Masyarakat | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu | 2 Dokumen | 4,500,000   | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU |
| 2.18.01.2.06.08 | Fasilitas Kunjungan Tamu   | Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu  |                            |                                   |                                  | 1 Laporan                              | 1 Laporan   | 20,000,000     | 73,350,000  | 5,600,000           | Kab. Lima Puluh Kota<br>Semua Kecamatan<br>Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | Perwisata dan Peningkatan Ekonomi Masyarakat | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu | 1 Laporan | 25,000,000  | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU |
| 2.18.01.2.06.09 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD             | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                |                            |                                   |                                  | 1 Laporan                              | 1 Laporan   | 175,250,000    | 164,546,750 | 161,582,750         | Kab. Lima Puluh Kota<br>Semua Kecamatan<br>Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | Perwisata dan Peningkatan Ekonomi Masyarakat | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu | 1 Laporan | 200,000,000 | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU |

|   |    |   |      |  |   |  |           |           |             |             |             |  |                                      |   |   |  |             |             |  |
|---|----|---|------|--|---|--|-----------|-----------|-------------|-------------|-------------|--|--------------------------------------|---|---|--|-------------|-------------|--|
| 2 | 18 | 1 | 2.07 | <b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>      | Nilai SAKIP OPD   | 71 Baik  | 0 Baik    | 0         | 178,500,000 | 0           |             |  |                                      |   |   | 71 Baik  | 554,000,000 |             |  |
| 2 | 18 | 1 | 2.07 | 2  | Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan   | Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan                                  | 3 Unit    | 0 Unit    | 0           | 0           | 0           | Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan                             | Pariwisata dan Peningkatan Ekonomi Masyarakat | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu | 3 Unit      | 450,000,000 | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU |
| 2 | 18 | 1 | 2.07 | 5  | Pengadaan Mebel   | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan   | 26 Unit   | 0 Unit    | 0           | 0           | 0           | Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan                             | Pariwisata dan Peningkatan Ekonomi Masyarakat | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu | 26 Unit     | 51,000,000  | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU |
| 2 | 18 | 1 | 2.07 | 6  | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya   | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan  | 29 Unit   | 0 Unit    | 0           | 178,500,000 | 0           | Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar | Pariwisata dan Peningkatan Ekonomi Masyarakat | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu | 29 Unit     | 53,000,000  | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU |
| 2 | 18 | 1 | 2.08 | <b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>                  | Persentase Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah  | 12 bulan   | 12 bulan  |           | 238,060,000 | 251,576,000 | 202,714,000 |  |                                      |   |   |  | 12 bulan    | 255,500,000 |  |
| 2 | 18 | 1 | 2.08 | 1  | Penyediaan Jasa Surat Menyurat  | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat  | 1 Laporan | 1 Laporan | 2,420,000   | 500         | 280         | Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Memperkuat Kotahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan   | Pariwisata dan Peningkatan Ekonomi Masyarakat | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu | 1 Laporan   | 5,500,000   | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU |
| 2 | 18 | 1 | 2.08 | 2  | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik   | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan                 | 1 Laporan | 1 Laporan | 45,500,000  | 58,800,000  | 58,800,000  | Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Memperkuat Kotahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan   | Pariwisata dan Peningkatan Ekonomi Masyarakat | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu | 1 Laporan   | 50,000,000  | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU |
| 2 | 18 | 1 | 2.08 | 4  | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor   | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan                                   | 1 Laporan | 1 Laporan | 190,140,000 | 192,276,000 | 143,634,000 | Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Memperkuat Kotahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan   | Pariwisata dan Peningkatan Ekonomi Masyarakat | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu | 1 Laporan   | 200,000,000 | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU |
| 2 | 18 | 1 | 2.09 | <b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b> | Nilai SAKIP OPD   | 71 Baik  | 71 Baik   |           | 217,440,000 | 211,296,000 | 318,526,000 |  |                                      |   |   |  | 71 Baik     | 557,000,000 |  |
|   |    |   |      |  | Persentase Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Daerah  | 12 bulan   | 12 bulan  |           |             |             |             |  |                                      |   |   |  | 12 bulan    |             |  |
| 2 | 18 | 1 | 2.09 | 1  | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan dan dibayarkan Pajaknya | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya | 20 Unit   | 20 Unit   | 195,480,000 | 127,836,000 | 116,456,000 | Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar | Pariwisata dan Peningkatan Ekonomi Masyarakat | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu | 20 Unit     | 203,000,000 | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU |

**Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kabupaten Lima Puluh Kota  
Tahun 2023**

| Kode            | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan   | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan   | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan |                          |                |             |                     |  |                                      | Kelompok Sasaran  | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024            |  | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |             |  |
|-----------------|--|---|----------------------------|-----------------------------------|--|--|--------------------------|----------------|-------------|---------------------|--|--------------------------------------|---|--|--|-----------------------------------|-------------|--|
|                 |  |   |                            |                                   |  | Target 2023                            |                          | Pagu Indikatif |             |                     | Lokasi   | Sumber Dana                          |   | Prioritas                                    |  |                                   | Target      | Pagu Indikatif   |
|                 |  |   |                            |                                   |  | Semula                                 | Menjadi                  | RKPD 2023      | APBD 2023   | RKPD 2023 Perubahan |  |                                      |   | Nasional                                     | Daerah   |                                   |             |  |
| 2.18.01.2.09.06 | Pemeliharaan Perlatan dan Mesin Lainnya  | Jumlah Perlatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara   |                            |                                   |  | 69 Unit<br>12 Bulan                    | 69 Unit<br>12 Bulan      | 21,960,000     | 6,210,000   | 2,070,000           | Kab. Lima Puluh Kota<br>Semua Kecamatan<br>Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar | Parwisata dan Peningkatan Ekonomi Masyarakat | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu | 69 Unit<br>12 Bulan               | 24,000,000  | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU |
| 2.18.01.2.09.09 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya   | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi  |                            |                                   |  | 1 Paket                                | 1 Paket                  | 0              | 77,250,000  | 200,000,000         | Kab. Lima Puluh Kota<br>Semua Kecamatan<br>Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar | Parwisata dan Peningkatan Ekonomi Masyarakat | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu | 1 Paket                           | 330,000,000 | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU |
| 2.18.02         | <b>PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL</b>  | Persentase peningkatan Penetapan Kebijakan Penanaman Modal  | %                          | %                                 |  | 15 %                                   | 15 %                     | 291,895,850    | 155,001,450 | 11,777,550          |  |                                      |   |  |  | 15 %                              | 470,000,000 |  |
| 2.18.02.2.01    | <b>Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Bidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota</b> | Persentase Peningkatan Nilai Investasi<br>Persentase Peningkatan Realisasi Investasi                                  | milyar<br>milyar           | milyar<br>milyar                  |  | 442 milyar<br>419 milyar               | 442 milyar<br>419 milyar | 212,204,250    | 145,381,950 | 11,777,550          |  |                                      |   |  |  | 442 milyar<br>419 milyar          | 365,000,000 |  |
| 2.18.02.2.01.01 | Penetapan Kebijakan Daerah Mengemai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal                     | Jumlah Peraturan Daerah/Provinsi dalam Mengemai Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal                      |                            |                                   |  | 2 Dokumen                              | 2 Dokumen                | 157,801,700    | 31,689,000  | 0                   | Kab. Lima Puluh Kota<br>Semua Kecamatan<br>Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan   | Parwisata dan Peningkatan Ekonomi Masyarakat | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu | 2 Dokumen                         | 295,000,000 | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU |
| 2.18.02.2.01.02 | Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Berusaha di Daerah                                 | Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Memperoleh Insentif dan Kemudahan Berusaha di Daerah                     |                            |                                   |  | 3 Kegiatan Usaha                       | 1 Kegiatan Usaha         | 54,402,550     | 113,692,950 | 11,777,550          | Kab. Lima Puluh Kota<br>Semua Kecamatan<br>Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan   | Parwisata dan Peningkatan Ekonomi Masyarakat | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu | 1 Kegiatan Usaha                  | 70,000,000  | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU |
| 2.18.02.2.02    | <b>Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota</b>   | Persentase Peningkatan nilai rencana Investasi<br>Persentase Peningkatan Realisasi Investasi                          | milyar<br>milyar           | milyar<br>milyar                  |  | 442 milyar<br>419 milyar               | 442 milyar<br>419 milyar | 79,691,600     | 9,619,500   | 0                   |  |                                      |   |  |  | 442 milyar<br>419 milyar          | 105,000,000 |  |
| 2.18.02.2.02.02 | Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota   | Jumlah Peta Potensi Investasi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota Memudahkan investor untuk memperoleh informasi potensi |                            |                                   |  | 1 Dokumen<br>1 Dokumen                 | 1 Dokumen<br>1 Dokumen   | 79,691,600     | 9,619,500   | 0                   | Kab. Lima Puluh Kota<br>Semua Kecamatan<br>Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan   | Parwisata dan Peningkatan Ekonomi Masyarakat | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu | 1 Dokumen<br>1 Dokumen            | 105,000,000 | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU |



**Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kabupaten Lima Puluh Kota  
Tahun 2023**

| Kode            | Urusan/ Bidang<br>Urusan/ Program/<br>Kegiatan/ Sub<br>Kegiatan  | Indikator Program/<br>Kegiatan/ Sub<br>Kegiatan  | Target<br>Akhir<br>Periode<br>RPJMD | Realisasi<br>Capaian<br>RKPD<br>Tahun<br>2021 | Prakiraan<br>Capaian<br>Target<br>RKPD<br>Tahun<br>2022 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan |             |                |           |  |  |  | Kelompok<br>Sasaran                                   | Prakiraan Maju Rencana<br>Tahun 2024                                  |             | Perangkat<br>Daerah<br>Penanggung<br>Jawab |   |                |
|-----------------|--|--|-------------------------------------|---|---|--|-------------|----------------|-----------|--|--|--|---|---|-------------|--|---|----------------|
|                 |  |  |                                     |   |   | Target 2023                            |             | Pagu Indikatif |           |  | Lokasi   | Sumber<br>Dana   |   | Prioritas   |             |  | Target  | Pagu Indikatif |
|                 |  |  |                                     |   |   | Semula                                 | Menjadi     | RKPD 2023      | APBD 2023 | RKPD 2023<br>Perubahan   |  |  |   | Nasional  | Daerah      |  |   |                |
| 2 18 03         | PROGRAM<br>PROMOSI<br>PENANAMAN<br>MODAL   | Persentase<br>Pelaksanaan Promosi<br>Penanaman Modal   | %                                   | %   | 10 %  | 10 %                                   | 245,955,000 | 77,359,700     | 0         |  |  |  |   | 10 %  | 348,000,000 |  |   |                |
| 2 18 03 2.01    | Penyelenggaraan<br>Promosi<br>Penanaman<br>Modal yang<br>Menjadi<br>Kewenangan<br>Daerah<br>Kabupaten/Kota   | Persentase<br>Peningkatan Nilai<br>Investasi<br><br>Persentase<br>Peningkatan Realisasi<br>investasi | milyar<br>milyar                    | milyar<br>milyar                              | 442 milyar<br>419 milyar                                | 442 milyar<br>419 milyar               | 245,955,000 | 77,359,700     | 0         |  |  |  |   | 442 milyar<br>419 milyar  | 348,000,000 |  |   |                |
| 2 18 03 2.01 01 | Penyusunan<br>Strategi Promosi<br>Penanaman Modal  | Jumlah Peraturan<br>Daerah yang Mengatur<br>Promosi Penanaman<br>Modal Kewenangan<br>Kabupaten/Kota  |                                     |   | 3 Dokumen   | 3 Dokumen                              | 62,951,600  | 36,249,800     | 0         | Kab. Lima<br>Puluh Kota<br>Semua<br>Kacamata<br>Semua<br>Kecamatan | Dana<br>Transfer<br>Umum-<br>Dana<br>Alokasi<br>Umum | Memperkuat<br>Ketahanan<br>Ekonomi Untuk<br>Pertumbuhan<br>Yang Berkualitas<br>dan Berkeadilan | Parwisata dan<br>Peningkatan<br>Ekonomi<br>Masyarakat | Dinas<br>Penanaman<br>Modal dan<br>Pelayanan<br>Terpadu<br>Satu Pintu | 3 Dokumen   | 78,000,000                                 | DINAS<br>PENANAMAN<br>MODAL DAN<br>PELAYANAN<br>TERPADU SATU<br>PINTU |                |
| 2 18 03 2.01 02 | Pelaksanaan<br>Kegiatan Promosi<br>Penanaman Modal<br>Daerah<br>Kabupaten/Kota   | Jumlah Dokumen Hasil<br>Kegiatan Promosi<br>Penanaman Modal<br>Kabupaten/Kota                        |                                     |   | 5 Dokumen   | 5 Dokumen                              | 183,003,400 | 41,109,900     | 0         | Kab. Lima<br>Puluh Kota<br>Semua<br>Kacamata<br>Semua<br>Kecamatan | Dana<br>Transfer<br>Umum-<br>Dana<br>Alokasi<br>Umum | Memperkuat<br>Ketahanan<br>Ekonomi Untuk<br>Pertumbuhan<br>Yang Berkualitas<br>dan Berkeadilan | Parwisata dan<br>Peningkatan<br>Ekonomi<br>Masyarakat | Dinas<br>Penanaman<br>Modal dan<br>Pelayanan<br>Terpadu<br>Satu Pintu | 5 Dokumen   | 270,000,000                                | DINAS<br>PENANAMAN<br>MODAL DAN<br>PELAYANAN<br>TERPADU SATU<br>PINTU |                |
| 2 18 04         | PROGRAM<br>PELAYANAN<br>PENANAMAN<br>MODAL   | Persentase<br>peningkatan<br>pelayanan modal yang<br>berinovasi                                      | %                                   | %   | 20 %  | 20 %                                   | 476,010,000 | 65,000,000     | 0         |  |  |  |   | 20 %  | 598,544,000 |  |   |                |
| 2 18 04 2.01    | Pelayanan<br>Perizinan dan<br>Non Perizinan<br>Secara Terpadu<br>Satu Pintu<br>dibidang<br>Penanaman<br>Modal yang<br>Menjadi<br>Kewenangan<br>Daerah<br>Kabupaten/ Kota | Skor Indeks Kepuasan<br>Masyarakat   | Baik                                | Baik  | 85 Baik   | 85 Baik                                | 476,010,000 | 65,000,000     | 0         |  |  |  |   | 85 Baik   | 598,544,000 |  |   |                |

**Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kabupaten Lima Puluh Kota  
Tahun 2023**

| Kode            | Urusan/ Bidang<br>Urusan/ Program/<br>Kegiatan/ Sub<br>Kegiatan  | Indikator Program/<br>Kegiatan/ Sub<br>Kegiatan  | Target<br>Akhir<br>Periode<br>RPJMD | Realisasi<br>Capaian<br>RKPD<br>Tahun<br>2021 | Prakiraan<br>Capaian<br>Target<br>RKPD<br>Tahun<br>2022 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan |                                 |                |            |                        |  |                                      | Kelompok<br>Sasaran   | Prakiraan Maju Rencana<br>Tahun 2024         |  | Perangkat<br>Daerah<br>Penanggung<br>Jawab |             |  |
|-----------------|--|--|-------------------------------------|---|---|--|---------------------------------|----------------|------------|------------------------|--|--------------------------------------|---|--|--|--|-------------|--|
|                 |  |  |                                     |   |   | Target 2023                            |                                 | Pagu Indikatif |            |                        | Lokasi   | Sumber<br>Dana                       |   | Prioritas                                    |  |  | Target      | Pagu Indikatif   |
|                 |  |  |                                     |   |   | Semula                                 | Menjadi                         | RKPD 2023      | APBD 2023  | RKPD 2023<br>Perubahan |  |                                      |   | Nasional                                     | Daerah   |  |             |  |
|                 |  |  |                                     |   |   |  |                                 |                |            |                        |  |                                      |   |  |  |  |             |  |
| 2.18.04.2.01.01 | Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Bersuaha Terintegrasi Secara Elektronik | Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Terpadu Perizinan Bersuaha Terintegrasi Secara Elektronik<br><br>Pemanfaatan aplikasi perizinan elektronik berbasis teknologi informasi dalam proses pelayanan perizinan dan non perizinan sesuai ketentuan yang berlaku (DSS dan SiCentik) |                                     |   |   | 1200 Pelaku Usaha<br>2 Aplikasi        | 1200 Pelaku Usaha<br>2 Aplikasi | 66,763,000     | 0          | 0                      | Kab. Lima Puluh Kota<br>Semua Kecamatan<br>Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | Perwisata dan Peningkatan Ekonomi Masyarakat | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu | 1200 Pelaku Usaha<br>2 Aplikasi            | 79,272,000  | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU |
| 2.18.04.2.01.02 | Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal  | pelayanan perizinan dan non perizinan terhadap pelaku usaha skala usaha mikro/ kecil dan skala investasi (menengah/besar) yang memuaskan   |                                     |   |   | 1100 Dokumen                           | 1100 Dokumen                    | 172,543,100    | 65,000,000 | 0                      | Kab. Lima Puluh Kota<br>Semua Kecamatan<br>Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | Perwisata dan Peningkatan Ekonomi Masyarakat | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu | 1100 Dokumen                               | 260,000,000 | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU |
| 2.18.04.2.01.03 | Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat Terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan            | Facilitasi pelayanan perizinan dan non perizinan terhadap pengelolaan pengaduan masyarakat yang memuaskan<br><br>Jumlah Orang yang Memperoleh Layanan Konsultasi dan Terkelolanya Pengaduan Masyarakat Terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan  |                                     |   |   | 15 Pengaduan<br>15 Orang               | 15 Pengaduan<br>15 Orang        | 62,159,100     | 0          | 0                      | Kab. Lima Puluh Kota<br>Semua Kecamatan<br>Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | Perwisata dan Peningkatan Ekonomi Masyarakat | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu | 15 Pengaduan<br>15 Orang                   | 79,272,000  | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU |

**Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kabupaten Lima Puluh Kota  
Tahun 2023**

| Kode            | Urusan/ Bidang/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan  | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan   | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan           |  |                |             |                     |  |  |   | Kelompok Sasaran                             | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024                      |  | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |  |
|-----------------|--|---|----------------------------|-----------------------------------|--|--|--|----------------|-------------|---------------------|--|--|---|--|--|--|-----------------------------------|--|
|                 |  |   |                            |                                   |  | Target 2023                                      |  | Pagu Indikatif |             |                     | Lokasi   | Sumber Dana  | Prioritas   |  | Target   | Pagu Indikatif                                   |                                   |  |
|                 |  |   |                            |                                   |  | Semula   | Menjadi  | RKPD 2023      | APBD 2023   | RKPD 2023 Perubahan |  |  | Nasional  |  |  |  |                                   | Daerah   |
| 2.18.04.2.01.04 | Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah              | Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah<br><br>Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah<br><br>Terlaksananya koordinasi dan fasilitasi terhadap tim teknis PTSP yang merupakan representasi perangkat daerah/instansi teknis dalam proses perizinan dan non perizinan penanaman modal (investasi) secara terpadu di Kabupaten Lima Puluh Kota sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku |                            |                                   |  | 0 Kegiatan Usaha<br>12 Kegiatan Usaha<br>12 Kali | 0 Kegiatan Usaha<br>12 Kegiatan Usaha<br>12 Kali | 174,544,800    | 0           | 0                   | Kab. Lima Puluh Kota<br>Semua Kecamatan<br>Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum   | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | Perwisata dan Peningkatan Ekonomi Masyarakat | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu | 0 Kegiatan Usaha<br>12 Kegiatan Usaha<br>12 Kali | 180,000,000                       | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU |
| 2.18.05         | <b>PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL</b>                                | Persentase peningkatan Pemantauan, pembinaan, pengawasan Investor   | %                          | %                                 | %  | 20 %   | 20 %   | 370,207,700    | 513,384,250 | 500,800,000         |  |  |   |  |  | 20 %   | 435,000,000                       |  |
| 2.18.05.2.01    | Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota | Peningkatan nilai rencana investasi   | milyar                     | milyar                            | milyar                                   | 580 milyar                                       | 580 milyar                                       | 370,207,700    | 513,384,250 | 500,800,000         |  |  |   |  |  | 580 milyar                                       | 435,000,000                       |  |
| 2.18.05.2.01.01 | Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal                     | Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal<br><br>Terlaksananya pemantauan penanaman modal   |                            |                                   |  | 80 Kegiatan Usaha<br>60 Investor                 | 80 Kegiatan Usaha<br>60 Investor                 | 63,900,000     | 12,584,250  | 0                   | Kab. Lima Puluh Kota<br>Semua Kecamatan<br>Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum<br><br>Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | Perwisata dan Peningkatan Ekonomi Masyarakat | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu | 80 Kegiatan Usaha<br>60 Investor                 | 75,000,000                        | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU |

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kabupaten Lima Puluh Kota  
Tahun 2023

| Kode            | Urusan/ Bidang<br>Urusan/ Program/<br>Kegiatan/ Sub<br>Kegiatan  | Indikator Program/<br>Kegiatan/ Sub<br>Kegiatan  | Target<br>Akhir<br>Periode<br>RPJMD | Realisasi<br>Capaian<br>RKPD<br>Tahun<br>2021 | Praktiran<br>Capaian<br>Target<br>RKPD<br>Tahun<br>2022 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan |                                     |                      |                      |                        |  |  | Kelompok<br>Sasaran   | Praktiran Maju Rencana<br>Tahun 2024         |  | Perangkat<br>Daerah<br>Penanggung<br>Jawab |             |  |
|-----------------|--|--|-------------------------------------|---|---|--|-------------------------------------|----------------------|----------------------|------------------------|--|--|---|--|--|--|-------------|--|
|                 |  |  |                                     |   |   | Target 2023                            |                                     | Pagu Indikatif       |                      |                        | Lokasi   | Sumber<br>Dana   |   | Prioritas                                    |  |  | Target      | Pagu Indikatif   |
|                 |  |  |                                     |   |   | Semula                                 | Menjadi                             | RKPD 2023            | AP/SD 2023           | RKPD 2023<br>Perubahan |  |  |   | Nasional                                     | Daerah   |  |             |  |
| 2.18.05.2.01.02 | Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal  | Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal Terlaksananya pembinaan bagi pelaku usaha Terlaksananya bimbingan teknis ketentuan penanaman modal dan kemudahan berusaha |                                     |   |   | 150 Pelaku Usaha<br>60 Perusahaan      | 150 Pelaku Usaha<br>60 Perusahaan   | 195,307,700          | 250,108,000          | 330,100,000            | Kab. Lima Puluh Kota<br>Semua Kecamatan<br>Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-<br>Dana Alokasi Umum<br>Dana Transfer Khusus-<br>Dana Alokasi Khusus Non Fisik | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | Perwisata dan Peningkatan Ekonomi Masyarakat | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu | 150 Pelaku Usaha<br>60 Perusahaan          | 220,000,000 | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU |
| 2.18.05.2.01.03 | Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal   | Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Terlaksananya pengawasan penanaman modal   |                                     |   |   | 120 Kegiatan Usaha<br>60 Perusahaan    | 120 Kegiatan Usaha<br>60 Perusahaan | 111,000,000          | 250,692,000          | 170,700,000            | Kab. Lima Puluh Kota<br>Semua Kecamatan<br>Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-<br>Dana Alokasi Umum<br>Dana Transfer Khusus-<br>Dana Alokasi Khusus Non Fisik | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | Perwisata dan Peningkatan Ekonomi Masyarakat | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu | 120 Kegiatan Usaha<br>60 Perusahaan        | 140,000,000 | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU |
| 2.18.06         | <b>PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL</b>   | Persentase peningkatan penyajian data dan informasi perizinan dan non perizinan berbasis elektronik  | %                                   | %   | %   | 10 %                                   | 10 %                                | 60,270,800           | 37,624,900           | 5,000,000              |  |  |   |  | 10 %   | 66,000,000                                 |             |  |
| 2.18.06.2.01    | Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota  | Persentase Peningkatan Nilai Investasi<br>Persentase Peningkatan Realisasi Investasi   | milyar<br>milyar                    | milyar<br>milyar                              | milyar<br>milyar  | 442 milyar<br>419 milyar               | 442 milyar<br>419 milyar            | 60,270,800           | 37,624,900           | 5,000,000              |  |  |   |  | 442 milyar<br>419 milyar                               | 66,000,000                                 |             |  |
| 2.18.06.2.01.01 | Pengolahan, Penyajian dan Remanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan | Jumlah Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan  |                                     |   |   | 19 Dokumen                             | 19 Dokumen                          | 60,270,800           | 37,624,900           | 5,000,000              | Kab. Lima Puluh Kota<br>Semua Kecamatan<br>Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-<br>Dana Alokasi Umum   | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Bertalenta Seing          | Perwisata dan Peningkatan Ekonomi Masyarakat | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu | 19 Dokumen                                 | 66,000,000  | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU |
| <b>TOTAL</b>    |  |  |                                     |   |   |  |                                     | <b>5,243,600,084</b> | <b>4,782,343,813</b> | <b>3,854,453,182</b>   |  |  |   |  |  | <b>9,133,513,108</b>                       |             |  |

## **BAB IV PENUTUP**

Perubahan RENJA DPMPTSP Tahun 2023 ini merupakan rencana kerja tahunan yang disusun berdasarkan RENSTRA DPMPTSP Tahun 2021-2026 dan RPJM Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021-2026, selanjutnya akan dituangkan dalam Perubahan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2023, sehingga Visi dan Misi Kabupaten Lima Puluh Kota serta target dan Sasaran Pembangunan yang telah disusun dapat tercapai.

Dengan berlandaskan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku sesuai dengan tujuan dan fungsinya, Perubahan RENJA Tahun 2023 merupakan dokumen rencana operasional pelaksanaan program dan kegiatan Tahun 2023 guna mendukung pencapaian arah, tujuan, sasaran dan target prioritas rencana pembangunan jangka pendek Tahun 2023.

Dalam rangka menjamin terlaksananya kegiatan-kegiatan tersebut serta untuk terwujudnya sinergitas kinerja semua pihak yang terkait, maka ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut:

1. Seluruh aparatur DPMPTSP berkewajiban untuk melaksanakan program-program dan kegiatan-kegiatan yang telah ditetapkan dalam Perubahan Renja Tahun 2023 dengan efektif dan efisien.
2. Perubahan RENJA Tahun 2023 merupakan dokumen perencanaan perubahan sebagai langkah awal dalam penyusunan perubahan anggaran Tahun 2023, dimana Perubahan RENJA Tahun 2023 dijabarkan lebih lanjut dalam dokumen pelaksanaan anggaran.
3. Untuk menjamin konsistensi, sinergitas, harmonisasi, integrasi, efektivitas dan efisiensi pelaksanaan program dan kegiatan DPMPTSP, seluruh aparatur DPMPTSP secara berjenjang, wajib melakukan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan Perubahan RENJA Tahun 2023.
4. Tata cara penyusunan Perubahan Renja Tahun 2023 mengacu pada Peraturan menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Peraturan

Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, tatacara Penyusunan, pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana pembangunan Daerah.

5. Perubahan Renja Tahun 2023 berlaku sejak tanggal ditetapkan, adapun Langkah-langkah persiapan dimulai sejak tanggal ditetapkan hingga pelaksanaannya perlu terus dilakukan dengan memperhatikan dan menerapkan prinsip-prinsip koordinasi, sinkronisasi, sinergitas, harmonisasi dan efektivitas dan efesiensi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.

Demikian Rencana Kerja ini kami buat sebagai bahan pertimbangan Program Kerja Tahun 2023.

Tanjung Pati, September 2023

Kepala Dinas Penanaman Modal dan  
Pelayanan Terpadu Satu Pintu  
Kabupaten Lima Puluh Kota

**ANETA BUDI PUTRA, AP,M.Si**

Nip.19750515 199501 1 001

